

**PERAN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
PADA PEMILUKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2011
(TINJAUAN MENURUT FIQIH SIYASAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AMRAN HABIBI
11024102113

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Pemilukada kota Pekanbaru Tahun 2011 merupakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat kota Pekanbaru. Peran kader partai politik dilihat tidak terlalu dominan dalam menentukan kemenangan calon yang diusung. Ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh berbagai partai politik pada pemilukada. Hal ini perlu diteliti, sehingga penulis meneliti ini dengan memberikan judul “ Peran Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilukada kota Pekanbaru Tahun 2011 Di Tinjauan Menurut Fiqih Siyasah.

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta jajaran kebawah Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran kader PKS dalam pemenangan H.Firdaus, ST.MT dan Ayat Cahyadi,S.Si pada pemilukada. Kemudian untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah tentang peran kader Partai PKS tersebut serta mengetahui tanggapan masyarakat tentang PKS dalam tim PAS .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun subjek penelitian ini adalah kader-kader Partai Keadilan Sejahtera kota pekanbaru yang aktif dalam pemenangan H.Firdaus, ST.MT dan Ayat Cahyadi, S.Si. Sementara objek penelitian ini adalah peran kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam tim Profesional, Amanah dan Santun (PAS) pada pemilukada Pekanbaru Tahun 2011 kemudian ditinjau menurut fiqih siaysah. Populasi penelitian ini adalah kader PKS kota Pekanbaru yang dikategorikan sebagai Kordinator koalisi PKS-PAS berjumlah 4 orang, kordinator inti pemenangan internal PKS berjumlah 6 orang dan kordinator di kecamatan.yang berjumlah 24 orang. Jadi penulis mengambil sampel sebanyak 34 orang dengan menggunakan purposive sampling. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu diambil dari kader kordinator koalisi, kordinator inti dan kordinator kecamatan. Kemudian dari data sekunder yaitu kepustakaan, dokumentasi, SK-SK dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan deskriptif analitik.

Melalui observasi dan wawancara lapangan dengan responden. Serta dokumen-dokumen dan SK-SK yang ditemukan. Maka peneliti mendapati jawaban-jawaban bahwa kader Partai Keadilan Sejahtera kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam kemenangan H.Firdaus, ST.MT dan Ayat Cahyadi, S.Si. mulai dari penjaringan calon, kampanye sampai pada penetapan pleno oleh KPU kota Pekanbaru terhadap pemenang pasangan H.Firdaus, ST.MT dan Ayat Cahyadi, S.Si.

KATA PENGANTAR

Pujian syukur hanyalah kepada Allah swt semata, atas Rahmat dan karunia-Nya jugalah sehingga hamba masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi berupa penelitian ilmiah yang berjudul **“Peran Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011 (Tinjauan Menurut Fiqih Siyasah)”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada umi dan abiku, serta abang, kakak dan adekku Nur Azizah. Mereka telah memberikan perannya masing-masing seperti umi do’anya yang selalu saya rasakan, begitu juga ayah pengorbanan materinya demi kesuksesan anaknya. Abang yang selalu perantara menyampaikan belanja selama saya menuntut ilmu, kakak juga dengan motivasinya agar tidak melambat-lambatkan menjemput Sarjana dari kampus tercinta Uin Sultan Syarif Kasim Riau (SUSKA). Adek Nur Azizah juga selalu memberikan pesan walaupun tidak langsung kalau saya harus cepat tamat S1, karena dia juga ingin kuliah yang sebentar lagi tamat Madrasah Alaiyah Negeri(MAN) Sibuhuan.

Terima kasih kepada pembimbing skripsi saya bapak Bambang Hermanto, MA yang telah bersedia memberikan bimbingannya kepada saya dalam hal mengolah data, dan cara editan yang benar. Kemudian kepada pak Haswir sebagai sekretaris jurusan pertama saya, beliau telah banyak membantu saya terutama dalam hal pengurusan transfer perkuliahan. Terima kasih banyak kepada pak

Ismardi, M.Ag sebagai ketua jurusan Jinayah Siyasah saat ini yang telah mengurus kami mahasiswa Jinayah Siyasah.

Yang tak terlupakan teman-teman mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah terutama angkatan 2008 maupun teman yang pernah sama-sama belajar dengan saya dari jurusan lain. Teristimewa teman berbagi dan bercanda yaitu; Dedi Irwansyah,S.Sy, Syafria,S.Sy, Tuti, Dede Setiadi, Maruli Azhari Hasibuan, Muhammad Yusri Tanjung, Ahmad Efendi Siregar, Sri Melani, Nur Salim, Budi Susanto, Rani Elina, Amrun dan Muhammad Hakimi. Dan yang tidak terlupakan teman tercinta Allohu yarhamuhu Redial Agustion, sebagai teman bercanda semasa hidupnya. Ucapan khusus saya untuk beliau: “ Semoga Allah menerima amal ibadahmu dengan kasih sayangNya. Kalau boleh kami berucap beliau adalah salah satu teman kami yang berjuang menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.”

Salam ukhuwah wa syukron Jazila ikhwahfillah pengurus DPD PKS kota Pekanbaru baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam hal memberikan data maupun informasi pada penulisan skripsi penulis. Barokallahu lakum fi kulli makani wa zamani..

Semoga kita semua menjadi insan pemegang amanah dan menjadi generasi penyebar kebenaran. Amiiin!

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Metodologi Penelitian	9
1. Lokasi Penelitian	9
2. Subjek dan Objek Penelitian	9
3. Populasi dan Sampel	10
4. Suber Data	10
5. Metode Analisa Data	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN UMUMPARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	
KOTA PEKANBARU	12
A. Sejarah Berdirinya DPD Partai Keadilan Sejahtera kota	
Pekanbaru.....	12
B. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.	18
C. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan	
Sejahtera Kota Pekanbaru.....	22
BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERAN KADER PARTAI	
POLITIKPADA PEMILUKADA DAN PEMENANGAN	
CALON KEPA-LA DAERAH	28
A. Pengertian Peran	28
B. Pengertian Pemilukada	28
C. Langkah-Langkah Pemilukada	31
D. Faktor Kemenangan Secara Umum	32
E. Konsepsi Siyasah Secara Umum	33
F. Jabatan Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru	38
G. Partai Politik	38
H. Strategi Pemenangan	42
1. Defenisi dan Konsep Strategi.....	42
2. Tipe-Tipe Strategi	43
I. Perekrutan Calon	44
J. Sosialisasi dan Kampanye	45
K. Tim Sukses	46
L. Koalisi Politik	51

M. Tim Profesional, Amanah dan Santun (PAS)	54
BAB IV: PERAN KADER PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	
DALAM PEMENANGAN WALI KOTA H. FIRDAUS, ST. MT	
DAN WAKIL WALI KOTA AYAT CAHYADI, S.Si.....	56
A. Strategi Dalam Pemenangan Walikota Firdaus,ST.MT dan Wakil Walikota Ayat Cahyadi, S.Si	56
1. Program Tim PAS	58
a. Membangun Network	59
b. Direcselling	60
c. Saksi di Tempat Pemunguta Suara (TPS)	62
2. Struktur	64
B. Peran Kader Partai Keadilan Sejahtera	68
1. Tahap Pertama	68
2. Tahap Kedua	70
3. Tahap Ketiga	71
C. Fikih Siyasah Tentang Peran Umat Mengangkat Seorang Pemimpin.....	73
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Komposisi kekuatan politik PKS dalam pemilu legislative DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan(Dapil 1) Pekanbaru...	14
TABEL II.2	Komposisi kekuatan politik PKS dalam pemilu legislatif DPRD kota pekanbaru.....	16
TABEL II.3	Jumlah Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dapil(1) Pekanbaru Tahun 2009.....	18
TABEL II.4	Daftar Nama-nama Ketua DPC PKS Kota Pekanbaru.....	20
TABEL III.1	Tahap pertama penjabat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.....	38
TABEL III.2	Tahap kedua penjabat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	38
TABEL IV.1	Kabupaten kota yang melaksanakan pemilukada 2011.....	57
TABEL IV.2	Komposisi partai politik yang tergabung dalam tim PAS sesuai dengan kursi DPRD kota Pekanbaru periode 2009-2014.....	65
TABEL IV.3	Pengurus Tim Koalisi PAS.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah salah satu sistem yang dipakai di Indonesia. Meskipun demokrasi tidak memiliki kebenaran mutlak, namun Indonesia sebagai penganut Islam terbesar dunia sangat dekat dengan demokrasi. Islam memandang demokrasi bukan satu-satunya cara, dalam artian demokrasi tidak memiliki pengakuan agama Islam secara mutlak.

Pengamalan demokrasi di Indonesia dapat dilihat ketika pemilu yang dilakoni beberapa partai. Partai ini merupakan pengakuan rakyat yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum Indonesia. Pada setiap pemilihan di Indonesia selalu diwakili partai tersebut, apalagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang pemilu yang Pertama yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang partai politik dan persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum. Pada pemilu masa orde baru hingga tahun 1997 partai politik sempat 29 partai sedangkan setelah reformasi sampai berjumlah 48.

Di Indonesia kita melihat praktek demokrasi misalnya pada pelaksanaan pemilu selama delapan kali sejak kemerdekaan. Pada pemilu Indonesia telah mencoba mempraktekkan berbagai macam bentuk demokrasi, mulai dari demokrasi kuasa parlementer (1945-1949), demokrasi liberal (1950-1959),

demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila(1968-1997, sampai kepada demokrasi kerakyatan (1998-sekarang).¹

Pada setiap pemilihan di Indonesia baik pemilihan eksekutif, maupun legislative, baik penyelenggara Negara pusat maupun daerah sudah melakukan demokrasi dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilihan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang misalnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada pemilihan kepala Daerah landasan hukumnya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan eksekutif dan legislative baik pusat maupun daerah seperti pemilihan Kepala Daerah diamanahkan Undang-Undang kepada lembaga Negara yang resmi yaitu Komisi Pemilihan Umum, komisi pemilihan Umum Provinsi, kabupaten/kota.

¹Hafied, Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.2.

Pada tahun 2011 yang lalu kota pekanbaru merupakan salah satu daerah provinsi Riau yang telah melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota. Seiring dengan itu pelaksanaan pemilu pada waktu itu merupakan kali pertama dalam sejarah kota Pekanbaru dengan dua kali pungutan suara.

Pada saat pembentukan calon sempat publik menghadirkan beberapa individu untuk dijadikan opsi sebagai calon. Namun mereka mengusulkan calon tersebut hanya sebatas dukungan masyarakat saja. Dalam tahap ini yang pernah dimunculkan publik lumayan banyak. Namun pada proses verifikasi, berkas yang sampai kepada KPU hanya empat pasangan calon. sampai kepada pelaksanaan verifikasi calon maka kandidat yang lolos verifikasi hanya dua pasangan calon yaitu Pasangan Septina/ Erizal Muluk dan Firdaus, ST, MT/ Ayat Cahyadi, S.Si. penetapan calon masing-masing kandidat di usung oleh beberapa partai yang membentuk suatu koalisi.

Adapun yang mengusung calon pasangan Firdaus ST, MT dengan Ayat Cahyadi S.Sos adalah 6 partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, partai Demokrasi Keadilan (PDK), Partai Bulan Bintang(PBB), Partai Demokrat(PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP).

Calon wako Firdaus ST, MT dan wawako Ayat Cahyadi S.Si dalam kampanyenya disebut calon PAS alias Profesional, Amanah dan Santun. Dengan alat ini mereka meyakini masyarakat kota pekanbaru akan terpicat pada masa kampanye dan saat pemilu. Atas dasar itu PAS selalu menonjolkan semboyan PAS ketika kampanye-kampanye mereka sedang dilangsungkan.

Pak Ayat Cahyadi adalah kader inti PKS Pekanbaru yang merupakan utusan partai PKS yang berasaskan Islam untuk menyampaikan program dan cita-cita partainya bila terpilih pada pemilu pada waktu itu (2011). Atas beberapa pertimbangan PKS hanya mengusung kadernya sebagai calon wawako dalam artian Pak Ayat memerlukan pasangan yang memiliki kualitas, popularitas serta pencitraan nama yang baik di Pekanbaru. Dalam hal ini partai termotivasi pada ayat al-Qur'an yaitu²:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ
نِعْمَةٍ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah yang brhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hokum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat(QS an-Nisa : 58).

Sementara Pak Firdaus ST,MT merupakan calon Wako yang bukan pengurus salah satu partai. Meskipun beliau sudah lama di birokrasi pemerintahan provinsi Riau yang dibawah Pak Rusli Zainal. Namun beliau tidak identik dengan partai berlambang beringin itu.

Kader PKS kota Pekanbaru dikenal dengan kader yang solid dan bekerja tim yang efektif. Mereka memberikan kontribusi sesuai dengan amanah masing-masing. Tugas yang mereka terima merupakan arahan dari pengurus partai, sehingga para kader merasa menerima kewajiban untuk memberikan dukungan dan berusaha memenangkan kandidat yang diusung. Sesuai dengan anggaran dasar dan Rumah Tangga Partai Keadilan sejahtera pada Bab I pasal 2 “ Partai

² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Semarang, CV: Asy-Syifa, 1998), h.88

berasaskan Islam.” Kemudian disebutkan juga pada Bab II ayat 2, tujuan partai Islam PKS itu “ terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah subhana wata’ala dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai ini juga berkomitmen menerapkan ajaran Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila.

Pada pemilukada kota Pekanbaru yang berlangsung tahun 2011 para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berperan aktif dalam pesta demokrasi. Ini dikuatkan karena salah satu wakil kandidat calon Walikota merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Mereka berperan tidak hanya sebagai pendukung materi, namun mereka melakukan semuanya sejak awal proses pemilukada samapai pasca penetapan pemenang kandidat.

Perjuangan mereka tidak hanya sendirian karena sebelumnya mereka telah bergabung dalam bentuk koalisi yang diberi nama tim Profesioanl, Amanah dan Santun(PAS). Dalam tim inilah kader Partai Keadilan Sejahtera memberikan perannya demi memenangkan pemilukada, meskipun tim yang mereka bentuk berbeda-beda dalam ideologi partai.

Kader yang jumlahnya kurang lebih lima ribu orang tidak semuanya mendapat kesempatan memenangkan kandidat karena masing-masing alasan. Dari jumlah kader mereka jauh lebih sedikit dari jumlah kader partai Demokrat yang juga anggota tim koalisi, namun lebih banyak dari kader Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Bulan Bintang dan partai anggota koalisi lainnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kursi masing-masing partai di DPRD kota Pekanbaru.

Selama proses pemilukada mulai penjaringan calon, penetapan calon, pengawasan di TPS, dan pengawasan di KPU dan sebagainya kader PKS selalu aktif memberikan kontribusinya.

Pada saat kampanye, kader PKS juga melibatkan diri dan tidak asing ketika masa-masa kampanye kostum, baliho, stiker, spanduk dan lainnya tidak hilang ditengah-tengah warna koalisi. Pada penyampaian orasi, atau kampanye PKS beserta koalisi juga memberikan perhatian yang sama kepada non muslim pada perkara kesejahteraan sosial dan agama. Pernyataan ini disampaikan oleh tim pemenangan ketika berkomunikasi langsung kepada masyarakat. Alasan mereka kota Pekanbaru merupakan kota yang heterogen dari segi penduduk karena ada Melayu, Minang, Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Aceh, Cina dan sebagainya. Dalam hal ini agama juga bermacam-macam antara lain Islam, Kristen Katolik, Protestan, Budha dan Hindu.

Permasalahan disini adalah meskipun persoalan politik merupakan bahagian daripada persoalan agama bahkan politik boleh masuk dalam agama menurut Al-Qardhawi, akan tetapi persoalan politik tidak seharusnya berjalan sendiri tanpa panduan syariat³. Terkait hal ini pada pemilukada kota Pekanbaru tahun 2011 tentang program Tim PAS untuk memenangkan kandidat yang mereka usung. Dalam hal peran, para kader PKS bagaimana peran mereka ketika pemilukada. Apakah PKS juga melakukan kemenangan yang sifatnya demi kepentingan koalisi. Karena menurut kacamata peneliti masih banyak yang belum terungkap tentang peran kader PKS bahkan sering tidak terlihat pengaruhnya

³Al-Qardhawi, Yusuf, *Agama Dan Politik Wawasan Idel dan Menyanggah Kekeliruan Pemikiran Sekular-Liberal*, alih bahasa oleh Ibnu Sham (Kuala Lumpur: Alam Raya Interprise, 2009), h.26.

dalam kemenangan calon selama proses pemilu. Padahal mereka telah melakukan banyak perannya seperti masa penjurusan bakal calon mereka telah melakukan usaha keras demi terjaminnya calon yang diusung tidak berlawanan dengan visi misi partainya juga keinginan masyarakat Pekanbaru. Kemudian pada proses kampanye bagaimana mereka melakukan perannya yang tidak hanya menguntungkan bagi tim koalisinya, akan tetapi berguna juga bagi umat Islam Pekanbaru. Padahal masyarakat kota Pekanbaru sudah mengenal Partai Keadilan Sejahtera yang kuat dengan gerakan dakwahnya dalam berpolitik. Kemudian PKS kota Pekanbaru bagi mereka adalah sebuah partai berideologi Islam yang selama ini merupakan salah satu partai Islam harapan masyarakat kota Pekanbaru sebagai tonggak penegak syariat. Namun karena realita di lapangan, masyarakat kota Pekanbaru tidak melihat peran kader PKS dalam tim koalisi sebagai garda depan membawa arus perjuangan mereka.

Atas uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik melanjutkan penelitian ini dengan judul skripsi. “ **PERAN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PEMILUKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 (TINJAUAN MENURUT FIQH SIYASAH).**”

B. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

Para kader PKS sering tidak terlihat pengaruhnya dalam kemenangan calon selama proses pemilu. Padahal mereka telah melakukan banyak perannya seperti masa penjurusan bakal calon mereka telah melakukan usaha keras demi terjaminnya calon yang diusung tidak berlawanan dengan visi misi

partainya. Kemudian pada proses kampanye bagaimana mereka melakukan perannya yang tidak hanya menguntungkan bagi tim koalisinya, akan tetapi berguna juga bagi umat Islam Pekanbaru. Begitu juga pada proses pemungutan suara sehingga sampai ke KPU untuk memutuskan hasil penghitungan suara.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pemilukada kota Pekanbaru yang dilaksanakan Tahun 2011, yaitu peran kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kemenangan calon selama pemilukada kota Pekanbaru Tahun 2011.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Pekanbaru dalam tim PAS pada kemenangan calon walikota dan wakil walikota pemilukada tahun 2011?
2. Bagaimanakah pandangan fiqih siyasah terhadap peran kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Pekanbaru) sebagai anggota koalisi Tim PAS pada pemilukada kota Pekanbaru tahun 2011?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kader PKS dalam kemenangan pemilukada tahun 2011 dalam hal kemenangan calon walikota dan wakil walikota yang diusung beserta partai koalisi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah pada peran kader PKS dalam tim PAS dalam kemenangan pemilu 2011.

2. Kegunaan penelitian ini adalah

- a. memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat kota pekanbaru bagaimana peran kader PKS dalam memenangkan calon yang mereka usung.
- b. memberi kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika UIN SUSKA RIAU dan masyarakat kota Pekanbaru
- c. menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang penulis dapatkan di UIN SUSKA RIAU.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) kota Pekanbaru yang beralamat Jl. Kutilang No.13, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru-Riau. Serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan PKS se-Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjeknya adalah kader Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Kota Pekanbaru yang menjadi pengurus di DPD PKS Pekanbaru dan aktif dalam pemenangan calon saat pemilu pada tahun 2011. Sedangkan objeknya adalah peran kader PKS dalam tim PAS pada pemenangan H.Firdaus, ST.MT dan Ayat Cahyadi, S.Si.

3. Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah Kader PKS yang bergabung dalam tim PAS terdiri dari:

1. kader yang merupakan kordinator Tim PAS yang aktif dalam pemenangan yang berjumlah 4 orang.
2. Kader yang menjadi kordinator inti pemenangan dalam internal PKS yang berjumlah 6 orang, dan;
3. Kordinator kecamatan yang terdiri dari 24 orang.

Jadi populasinya semua berjumlah 34 orang. Karena populasinya tidak terlalu banyak, maka peneliti menjadikan semua menjadi sampel penelitian.

4. Sumber data

- a. Data primer yang diambil secara langsung melalui obsevasi dan wawancara. Dengan mendatangi beberapa Tim pemenangan dari kader-kader PKS serta pihak yang terkait.
- b. Data skunder meneliti terkait dengan dokumentasi, SK-SK serta bukti-bukti yang ditemukan peneliti sendiri.

5. Metode analisa data

Pendekatan kualitatif :

- a. Deskriptif yaitu menceritakan data yang ditemukan dilapangan apa adanya, kemudian menganalisa data tersebut.
- b. Induktif yaitu meneliti bahan-bahan melalui dokumen atau SK secara khusus kemudian disederhanakan secara umum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan berupa Latar belakang, Permasalahan yang terdiri dari (Identifikasi masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah),Tujuan dan Kegunaan, Metodologi Penelitian dan Sistem Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Pekanbaru

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera(PKS) kota Pekanbaru
2. Struktur Organsasi PKS kota Pekanbaru
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS Kota Pekanbaru

BAB III Tinjauan umum tentang;

1. Konsep teori peran kader partai politik dalam pemilukada
2. Peran partai politik dalam koalisi untuk memenangkan calon kepala daerah.
3. Strategi pemenangan calon kepala daerah menurut Partai Keadilan Sejahtera.

BAB IV Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Tim PAS pada masa:

- (1). Penjaringan bakal calon, Penetapan calon dan Kampanye.(2.) Pada hari pemilihan, penghitungan, sampai kepada pelantikan kandidat yang menang.(3.) Tinjauan fiqih siyasah tentang peran kader PKS dalam Tim PAS pada pemilukada kota Pekanbaru tahun 2011.

BAB V Penutup- kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya DPD PKS Kota Pekanbaru

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H).¹

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar , Kebayoran baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera politik adalah alat meneruskan misi dakwah lewat pemerintahan baik legislative maupun eksekutif. Para kader partai yang terpilih memiliki peran sebagai anggota legislatif yang telah menyetujui aturan dalam partai. Kader-kader PKS di DPR dan DPRD serta di kepala daerah berupaya memperjuangkan agenda reformasi melalui lembaga mereka. PKS menganggap parlemen maupun kepala daerah sebagai mimbar dakwah untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar.

Secara sigap kader-kader partai membantu mereka yang tertimpa berbagai musibah: banjir, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, meletus gunung

¹ Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera & Peresmian Dewan Pimpinan Wilayah-Riau

merapi, dan lain-lainnya. Bahkan harian Republika menyatakan kader PKS selalu terdepan dalam menghadapi masalah seperti ini.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Pekanbaru di deklarasikan tahun 1999 yaitu setahun setelah deklarasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau². Deklarasi Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan di Kota Pekanbaru, pada 13 Jumadil Akhir 1419 H bersamaan tanggal 04 Oktober 1998. Hal ini merupakan pelengkap persyaratan mendirikan sebuah partai politik dengan membuat perwakilan di tingkat provinsi dan daerah sesuai jumlah minimal yang ditetapkan Undang-undang untuk seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat pelaksanaan deklarasi ketua panitia pada saat itu ialah bapak H.Mansur (Anggota DPRD Provinsi Riau sekarang). Deklarasi berlangsung dengan dihadiri 4000 ribuan massa yang merupakan massa terbesar deklarasi partai di tingkat kota waktu itu.

Pengaruh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kota Pekanbaru dari waktu-kewaktu belum signifikan meningkat. Bahkan tidak hanya di Pekanbaru, daerah lainnya juga sama belum pernah melewati 3 partai besar yaitu partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Khusus untuk Pekanbaru, PKS juga masih dibawah 2 Partai Islam yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal ini bisa dilihat kekuatan politik partai PKS dalam pemilu legislatif Tahun 2011³:

² DPP PKS, "*Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*".

³ *Parpol peserta pemilu 2009 dan komposisi kekuatan politik di Provinsi Riau*, (tt, Badan Kesatuan Politik dan Perlindungan masyarakat kota Provinsi Riau.

Tabel II : 1

Komposisi kekuatan politik PKS dalam pemilu legislatif DPRD

Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil 1) Pekanbaru

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase(%)
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	25 %
2	Partai Demokrat (PD)	2	25 %
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	12,5 %
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	12,5 %
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	12,5 %
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	12,5 %
Jumlah		8	100 %

Klasifikasi Kekuatan Partai Politik berdasarkan komposisi dan distribusi peraih kursi di DPRD Provinsi Riau dapil 1 Pekanbaru, maka kekuatan partai politik dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi A ; Partai politik yang mendapatkan kursi paling banyak, yakni :
 - a. Partai Golongan Karya
 - b. Partai Demokrat
2. Klasifikasi B ; Partai politik yang mendapat kursi paling sedikit, yakni:

- a. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Klasifikasi C ; Partai Islam yang mendapat kursi DPRD Provinsi dapil 1 Pekanbaru, yakni:
- a. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Klasifikasi D ; Partai Nasionalis yang mendapat kursi DPRD Provinsi dapil Pekanbaru, yakni :
- a. Partai Golkar (Golkar)
 - b. Partai Demokrat (PD)
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Kemudian kekuatan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Pekanbaru dapat juga dilihat melalui pencapaian kursi DPRD kota Pekanbaru periode 2009-2014 sebagaimana dalam table berikut⁴:

⁴ *Ibid*

Tabel II : 2

**Komposisi kekuatan politik PKS dalam pemilu legislatif DPRD
kota pekanbaru**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase (%)
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	9	21, 32 %
2	Partai Demokrat (PD)	9	21,32 %
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	7,14 %
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	9,52 %
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	11,90 %
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	9,52 %
7	Partai Demokrasi Kerakyatan (PDK)	1	2,38 %
8	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	4,76 %
9	Partai Damai Sejahtera (PDS)	5	11,90 %
10	Partai Hanura	1	2,38 %
Jumlah		43	100 %

Klasifikasi Kekuatan Partai Politik berdasarkan komposisi dan distribusi peraih kursi di DPRD kota Pekanbaru, maka kekuatan partai politik dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi A ; Partai politik yang meraih kursi terbanyak, yakni:
 - a. Partai Golongan Karya (Golkar)

- b. Partai Demokrat (PD)
- 2. Klasifikasi B ; Partai politik yang meraih kursi paling sedikit, yakni:
 - a. Partai Demokrasi Kerakyatan (PDK)
 - b. Partai Hanura
- 3. Klasifikasi C; Partai politik yang meraih kursi sedang, yakni:
 - a. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - b. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - c. Partai Damai Sejahtera (PDS)
 - d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS

Pencapaian Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan (1) Pekanbaru sebagai anggota DPRD provinsi. Maka jumlah suara yang mereka dapatkan bisa dilihat dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara sah partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi khusus untuk dapil (1) Pekanbaru. Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II: 3
Jumlah Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Anggota DPRD
Provinsi dapil(1) Pekanbaru Tahun 2009

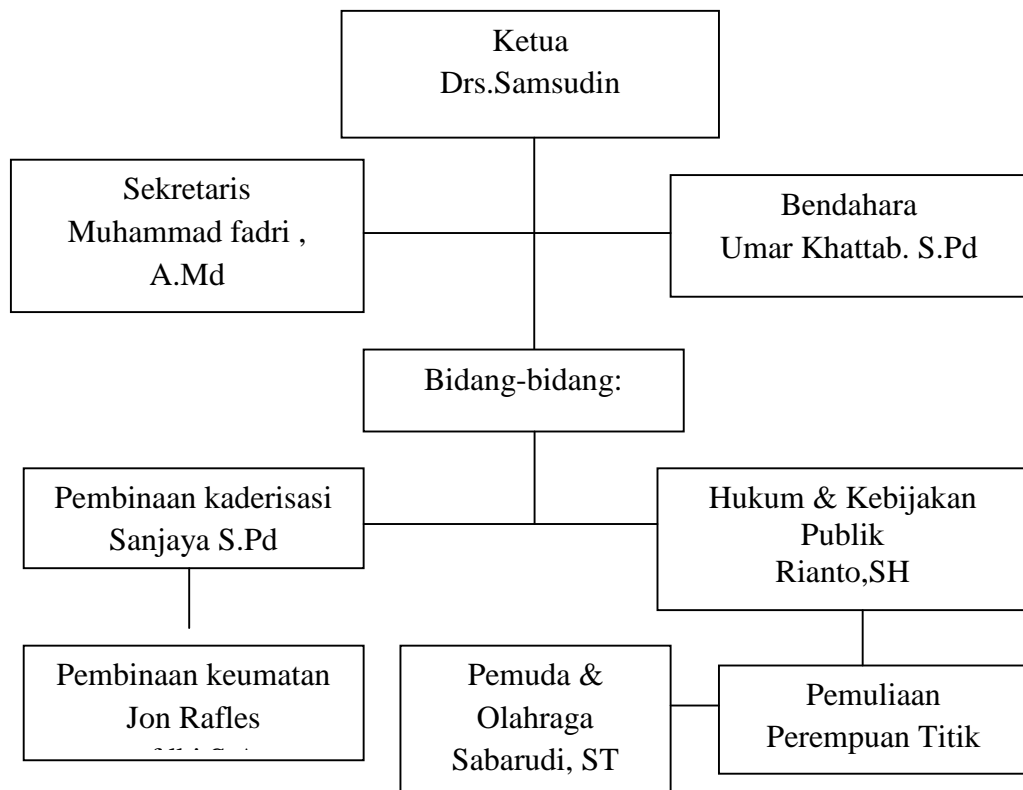
No	Nama Partai	Jumlah suara
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4.766
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	33.508
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	21.167
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4.891
5	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	4.846
6	Partai golongan Karya (Golkar)	45.918
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10.047
8	Partai Damai Sejahtera (PDS)	9.367
9	Partai Bulan Bintang (PBB)	5.680
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	11.447
11	Partai Bintang Reformasi (PBR)	3.916
12	Partai Demokrat (PD)	58.863

Suber : Data olahan KPU Provinsi Riau

B. Struktur Organisasi PKS kota Pekanbaru

Pengurus partai PKS kota Pekanbaru merupakan satu tangga dibawah pengurusan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Dewan Pengurus Daerah PKS (DPD PKS kota Pekanbaru). Adapun struktur pengurus partai periode 2009-2014 sesuai dengan AD/RT Partai Keadilan Sejahtera⁵:

⁵ Samsudin Ketua DPD PKS kota Pekanbaru ,(Wawancara, Sukajadi. 17 Agustus 2011) di kantor DPD PKS Kampung Melayu , Pekanbaru.



Pengurus lain:

- a. Sekbid kaderisasi : Helmi Rasydi, S.Si
- b. Biro keanggotaan & takwim : Wita
- c. Biro MDI : Muhammad Yunus, Lc, MA
- d. Biro attibyah : Abror Ramli, S.Si

Sekbir : dr. Nita Cahyaningsih

Anggota : Sri Winarti

- e. Biro manhaj & usrah : Muhammad Junaidi

Sekbir : H. Mualim Bahram, Lc

- f. Biro talabiyah : Ibnu Selamat, M.Si
- g. Biro diklat : Hartono, S.Pd
- h. Sekbid hokum & kebijakan publik : Saud Maruli Manik, SH
Anggota : Novi Erizon,SH
- i. Sekbid pemuliaan perempuan : Rita Kumala Sari
- j. Sekbid Pembina & keumatan : Baharuddin,S.Ag

Pengurus cabang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Pekanbaru berada disetiap kecamatan yang berjumlah 12 orang. Merekalah yang mengetuai pengurusan partai pada wilayah kecamatan tersebut. Daftar nama-nama ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS kota Pekanbaru sebagai tabel berikut⁶:

Tabel II: 4
Daftar Nama-nama Ketua DPC PKS Kota Pekanbaru

No	Nama	Kecamatan
1	Badaruddin	Tampan
2	Soni	Rumbai
3	Rois	Payung Sekaki
4	Hamdani	Marpoyan
5	Dedi	Sukajadi
6	Gus Hamidi	Pekanbaru Kota
7	Pauzi	Tenayan Raya
8	Risman	Sail
9	Nasihin	Bukit Raya
10	Budimansyah	Lima Puluh
11	Andi Widodo	Rumbai Pesisir
12	Arman	

⁶ Kantor DPD PKS kota Pekabaru, “ *Struktur pengurus kecamatan pks kota Pekanbaru*”,(tt, Sekretaris PKS kota Pekanbaru).

Program kader DPD PKS kota Pekanbaru , yakni:

- a. Pembinaan kader; Sebagaimana partai kader Partai Keadilan Sejahtera menempatkan pembinaan kader sebagai aktifitas utama dan pertama sehingga diharapkan akan lahir para kader yang memiliki kesadaran tinggi dan komitmen kuat melakukan perbaikan. Trainning Orientasi Partai diselenggarakan kepada para simpatisan yang berminat memasuki organisasi partai sebagai langkah awal pengenalan terhadap jati diri dan perjuangan partai.

Pemberian materi pembinaan diselenggarakan juga dalam bentuk kelas belajar, seminar, training bahkan ziarah kepada tokoh partai dan tokoh masyarakat. Berhubungan dengan pembinaan dan kaderisasi contoh kegiatan⁷ ;

- Pembinaan pekanan: Liqa/taklim/halaqah
- Peningkatan keilmuan: Tasqif, Dauroh
- Ifthar jama'I (buka puasa bersama)
- MABIT/malam bina iman dan taqwa (taujih dan shalat malam)
- Training Orientasi Partai (Pengealan Partai kepada masyarakat)

- b. Bidang Kebijakan Publik

Berhubung dengan pembelajaran politik bagi masyarakat, Pengawasan/advokasi usulan warga kepada pemerintah, mempererat hubungan dengan masyarakat. Contoh kegiatan:

⁷ *Ibid*

- Silaturahmi kepada Tokoh Masyarakat
- Pelatihan Komunikasi Politik
- Bakti Sosial: pengobatan, fogging

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Berhubung dengan pembinaan, Pelatihan ketrampilan perempuan. Contoh kegiatan:

- Pelatihan ketrampilan
- Seminar/Penyuluhan
- Bakti Sosial Anak dan Manula

d. Bidang Pemuda dan Olahraga

Berhubung dengan peningkatan kepemimpinan, olah fisik contoh kegiatan:

- Kepanduan: Mukhoyyam (perkemahan)
- Pelatihan Kepemimpinan
- Klub Olahraga: Futsal, senam PKS Nusantara, tenis meja, renang dan jogging.

C. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pekanbaru

Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera pada masa awal reformasi yang di pelopori sekelompok ulama dan akademisi. Mereka jelas menyatakan bahwa pendirian sebuah partai PKS bukan hanya sekedar pemenang pemilu akan tetapi lebih jauh daripada itu menyampaikan dakwah lewat birokrasi pemerintahan

Indonesia. Partai PKS juga mengakui keterlibatan mereka adalah demi tercapainya rakyat Indonesia yang berkeadilan dan mendapat kesejahteraan, karena menurut keyakinan PKS Indonesia telah mengalami sifat diktatorisme yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini dijelaskan dalam muqoddimah PKS yaitu: *“Reformasi Nasional pada hakikatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan Sejahtera bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.”*

Adapun tujuan Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan Bab 2 Pasal 5 yaitu: *“Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.*

Untuk mencapai tujuan tersebut partai membentuk berbagai usaha antara lain, yang bisa membebaskan bangsa Indonesia dari segala kezoliman sehingga menjadi masyarakat yang Islami.

Partai PKS memiliki pengurus pusat di ibu kota dan memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan di luar negeri PKS memiliki pengurusan partai yang disejajarkan dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) untuk satu Negara. Sebagaimana pada pasal 3(c) dan 3(d) disebutkan bahwa: *“Pasal 3 (c), Partai dapat membuka cabang-cabang di seluruh wilayah hukum negara Republik. Pasal 3 (d) Indonesia dan perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia.*

Struktur organisasi PKS sesuai pada Bab 4 Pasal 8 yaitu organisasi tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Syuro
- b. Majelis Pertimbangan Partai.h
- c. Dewan Syari'ah Pusat
- d. Dewan Pimpinan Pusat
- e. Lembaga Kelengkapan Partai

Setiap organisasi tingkat pusat tersebut memiliki pengurus di daerah kabupaten dan kota kecuali sebagian kecil saja seperti dewan syari'ah tingkat kabupaten langsung ke dewan syari'ah wilayah (DSW).

Partai Keadilan Sejahtera memiliki struktur Dewan Pimpinan Pusat sekurang kura ngnya beranggotakan sebagai dijelaskan pada Pasal 18, yaitu:

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jendral.
3. Bendahara Umum.
4. Departemen-departemen yang diperlukan.

Struktur organisasi wilayah, daerah, cabang dan ranting Pasal 20

Organisasi Tingkat Wilayah

1. Organisasi Wilayah didirikan pada tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi.
2. Struktur Organisasi tingkat wilayah terdiri dari
 - a. Dewan Syari'ah Wilayah
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah.

- c. Besarnya lembaga atau badan-badan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Pasal 21 Organisasi Tingkat Daerah, Cabang Dan Ranting⁸

1. Dalam lingkup organisasi tingkat wilayah didirikan organisasi Daerah pada tingkat kabupaten / kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kotamadya.
2. Dalam lingkup organisasi tingkat Daerah didirikan organisasi cabang dan dalam lingkup organisasi tingkat cabang pada tingkat kecamatan didirikan organisasi Ranting.
3. Struktur organisasi yang disebutkan ayat 1 dan 2 pasal ini disusun sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.

Pada pasal 21 menjelaskan bahwa pengurus partai tingkat daerah kabupaten/kota merupakan satu tingkat dibawah pengurus wilayah Provinsi. Adapun struktur pengurusan di daerah kabupaten/kota memiliki batas wilayah setiap kabupaten/kota.

Pengambilan kebijakan dalam PKS biasa dikenal dengan musyawarah dalam majelis syuro. Adapun yang melaksanakannya adalah seluruh elemen struktur Partai Keadilan Sejahtera. Sementara jenis dan jenjang musyawarah diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh majelis syuro. Dalam hal ini, musyawarah terbesar adalah Musyawarah Nasional yaitu pemegang kekuasaan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera yang diselenggarakan oleh majelis Syuro.

Sumber keuangan Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari iuran rutin anggota, sumbangan dan hibah dari para anggota dan simpatisan dan sumber-

⁸ *Ibid*

sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Jadi semua anggota dibebankan memenuhi iuran wajib partai. Namun besarnya disesuaikan dengan jenjang atau marhalahnya dalam partai. Dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 24 sebagai berikut:

Keuangan partai terdiri dari sumber-sumber berikut :

1. Iuran rutin anggota.
2. Sumbangan dan hibah dari para anggota dan simpatisan
3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Hubungan keorganisasian partai sebagaimana dalam Pasal 25 yaitu:

- a. Umat Islam Indonesia merupakan bagian dari ummat Islam sedunia. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai kawasan dunia.
- b. Untuk merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa, Partai melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.
- c. Majelis Syuro adalah lembaga yang berwenang memutuskan koalisi partai dengan partai atau organisasi lain.

Pasal 26 Hubungan Antar Struktur yaitu hubungan antar lembaga-lembaga partai tingkat pusat dan lembaga-lembaga partai tingkat pusat dengan lembaga-lembaga di bawahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Partai Keadilan Sejahtera mengutamakan kerjasama berdasarkan kemanusiaan dan agama, sehingga hubungan internasional umat muslim adalah satu kemestian. Permasalahan umat diluar negeripun menjadi perhatian partai seperti persolan Palestina.

Yang berhak memutuskan untuk berkoalisi atau tidak dengan organisasi atau partai lain adalah majelis syuro. Daerah hanyalah menjelaskan gambaran dilapangan sebagai pertimbangan pusat untuk memutuskan berkoalisi atau tidak.

Ketentuan Anggaran Rumah Tangga yaitu hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar partai dan Anggaran Rumah Tangga adalah tafsir dan penjabaran Anggaran Dasar yang direkomendasikan oleh Majelis Syuro. Pengesahan Anggaran Dasar disahkan oleh majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 yaitu:

Pengesahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Rapat Pendirian Partai tanggal 24 Maret 2002
2. Anggaran Dasar ini berlaku sementara sejak tanggal ditetapkan sampai diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERAN KADER PARTAI POLITIK PADA PEMILUKADA DAN PEMENANGAN CALON KEPALA DAERAH

A. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹ Jika dimasukan akhiran (*an*) menjadi peranan maknanya bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.² Peranan juga dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan seorang pemain. Sementara peran dalam bahasa Inggris adalah “*actor*” yang merupakan pelaku dalam sebuah kejadian ataupun peristiwa.³

Adapun kata kader maksudnya adalah orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting misalnya dipemerintahan, partai dan sebagainya. Partai kader maksudnya struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang termuka.

B. Pengertian Pemilukada

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 harus

¹ Peter, Salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, (Jakarta, Modern English Press: 1991), Edisi Pertama, h.1132.

² *Ibid*

³ Jhon, Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta, Gramedia: 1998), Edisi ke-3, Cet ke-6, h.421.

dilakukan pemilihan langsung.⁴ Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak terutama dikalangan para politisi dan elite daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilukada langsung menjadikan banyak pihak terlibat dalam menentukan kepala daerah, antara lain pemerintah, DPRD, Partai politik, KPU, Petugas Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas Independen (Panwaslu).

Pemilukada adalah sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilukada berkaitan dengan perilaku masyarakat banyak untuk menentukan penjabat strategis pemerintahan. Pemilukada dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya mencari pemimpin yang di inginkan masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penggunaan pemilukada tidak di sebutkan dalam pemilu presiden dan kepala desa. Karena masing-masing telah ada sebutan yang memberikan pemahaman tersendiri bagi masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk pertama kalinya telah terlaksana pada bulan Juni 2005 lalu. Pada penyelenggaraan Pilkada tersebut menorehkan beragam catatan. Ada Propinsi atau Kabupaten/Kota dengan mulusnya menyelenggarakan Pilkada, sementara ada pula yang menemui riak-riak dalam penyelenggaraannya. Paling memperihatinkan, pelaksanaan Pilkada di sebagian kecil daerah diwarnai praktek intimidasi bahkan menjurus aksi

⁴ Undang-Undang Dasar No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

anarkisme, khususnya saat menyikapi hasil Pilkada. Banyak aspek muncul dari penyelenggaraan Pilkada yang merupakan manifestasi politik otonomi daerah.

Pemilukada menurut KPU adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Pemilukada meliputi;

1. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pemungutan Suara Ulang atau di singkat dengan PSU merupakan Tahapan lanjutan pemilukada bahwa pemilukada putaran pertama tidak dianggap sah karena ada dugaan pelanggaran Undang-Undang pemilukada. Dalam hal ini melalui laporan berbagai pihak kepada institusi yang wewenang dan melalui proses hukum, laporan tersebut diterima dan diputuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Mekanisme Pemungutan Suara Ulang sedikit berbeda dengan pemilukada. Bedanya antara lain dalam pemilukada, sebelum melaksanakan pemilukada ada proses kampanye dan sosialisasi. Sedangkan pemungutan Suara Ulang tidak ada. Walaupun berbeda, namun lebih banyak kesamaan antara lain melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), para peserta pemilih melakukan pilihan hanya salah satu kandidat yang telah diverifikasi KPU sebelum pemilukada..

⁵ Buku panduan KPPS pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, h.10.

Tahapan Pemungutan suara ulang dimulai dengan merevisi kelompok kerja Pemungutan Suara Ulang oleh Komisi Pemilihan umum yang dibentuk tahap kedua. Mereka kemudian berkordinasi dengan walikota/ Pjs Walikota atau yang berwenang untuk membahas masalah anggaran. Kemudian tahap rapat pleno penyusunan penetapan tahapan Pemungutan Suara Ulang. Mereka juga mendata pemilih tambahan yang berhak memilih.

C. Langkah-langkah Pemilukada

Dalam pemilukada memiliki proses administrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Proses pemilukada sebagai berikut⁶:

1. Pembukaan pendaftaran calon untuk di verifikasi KPU. Dalam hal ini para pendaftar calon ditetapkan sebagai kandidat setelah melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Penetapan jadwal/lokasi kampanye para kandidat dengan menentukan tanggal mulai dan berakhirnya kampanye. Pada saat ini para kandidat di pastikan tidak melanggar aturan kampanye ataupun kode etik kampanye. Sesuai penjeasan UU No. 75 sampai 84 tentang proses dan peraturan kampanye.
3. Masa Tenang yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara para kandidat tidak dibenarkan lagi berkampanye.
4. Pelaksanaan pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan masyarakat hal ini sesuai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
5. Penghitungan suara di lokasi TPS yang dilakukan oleh anggota KPPS. Kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berwenang.

⁶ *Ibid*

Dalam pemilukada memiliki beberapa penyelenggara yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu⁷;

1. KPU

KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum yang berada di tingkat provinsi disebut KPU provinsi dan yang di tingkat kabupaten disebut KPU kabupaten yang berbentuk hirarkis.

2. PPK dan PPS

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia pemungutan Suara (PPS) adalah pelaksana pemilukada di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh KPU sendiri. PPK dan PPS adalah penyelenggara pemilukada yang bersifat sementara/ad hoc.

3. KPPS

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS adalah penyelenggara pemilukada yang bersifat sementara/ad hoc.

Adapun seperti Banwaslu yang dibentuk Panwaslu tidak termasuk penyelenggara pemilukada. Karna tugasnya hanya sebagai pemantau proses pelaksanaan pemilukada tanpa terlibat di dalamnya seperti menentukan anggota PPS atau PPK dan sebagainya.

D. Faktor Kemenangan Secara Umum⁸

⁷ Ibid

⁸ Joko J, Prihatmoko & Mooesafa, *Menang pemilu ditengah oligarki partai: Analisis strategi keberhasilan Adeg meraih kursi dengan BPP*, (Pustaka Pelajar: 2008), Cet Pertama, hal.161.

Apabila diklasifikasikan ada 4 model yang menjadi faktor kemenangan dalam pemilu, yaitu;

1. Identifikasi Psikologis (*psikologis Identification*). Berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya.
2. Identifikasi Kelas Sosial (*Class Identification*). Kesamaan yang dalam pandangan pemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinya dan kedudukan sosial partai.
3. Alasan Pilihan Rasional (*Rational Choise*). Berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi kalau seseorang memilih suatu partai.
4. Dominan Ideology (*Dominan Issue*). Dimaksudkan sebuah issue yang secara berhasil diajukan oleh suatu partai sebagai ciri dirinya, dan issue itu kemudian menimbulkan daya tarik yang luas.

E. Konsepsi Siyasah Secara Umum

Politik atau *Fiqh Siyasah* adalah bagian dari *Ulumul Syar'i* (ilmu agama) yang dalam Fiqh Islam terdapat dalam bab Imamah dan Jihad. Secara etimologi, fiqh siyasah adalah ilmu yang mengatur tentang urusan negara baik dalam negeri maupun luar negeri. Ruang lingkupnya adalah *Ri'ayah* (memelihara), *riyah* (kepemimpinan), *idaroh* (manajemen), *nizhom* (peraturan) dan *tahtid* (program). Imam Al-Ghazali sendiri berujar, “*Syari'ah harus dilindungi dengan daulah (negara atau politik).*”

Itu semua terkait dengan misi besar seorang Muslim yakni yang difirmankan Allah SWT Q.S Ali-Imran ayat 110⁹:

⁹ Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan, *op.cit.*,h.65.

خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik.”

1. Ri’ayah (memelihara)¹⁰

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”

Inilah yang dipraktekkan seorang Umar ibn Khattab sebagai khalifah yang rela berhitam-lebam punggungnya mengangkut berkarung-karung beras demi rakyatnya yang lapar. Secara luas, beliau adalah salah seorang Khalifah yang dicatat dengan tinta emas akan kebijakan-kebijakan administrasinya yang luar biasa dan berpihak pada kaum miskin, seperti menurunkan standar mahar (mas kawin) yang sangat selangit saat itu, dan menetapkan subsidi sosial dari *Baitul Maal* negara untuk rakyat miskin.

¹⁰ Depag, Al-Qur’an dan Terjemahan, *op.cit.*,h.114.

2. Riasah (kepemimpinan)¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Memilih pemimpin tidak sekedar atas prinsip demokrasi *Vox Populi Vox Dei* (suara rakyat suara Tuhan) yang sangat kita ragukan legitimasi akidahnya atas nama Islam. Tetapi memilih pemimpin adalah hal esensial yang akan dimintai pertanggungjawabannya di depan Allah di hari kiamat nanti. Bahkan sejarah Islam mencatat upacara pemakaman Rasulullah SAW pun tertunda karena prioritas pemilihan khalifah yang akan memegang tampuk kepemimpinan ummat selanjutnya. Jelas ini bukan sekedar kebetulan biasa. Ini jelas sebuah sinyal betapa pentingnya kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Terlebih lagi bagi yang dipilih menjadi pemimpin di mana ia harus berlaku amanah dan tidak boleh meminta-minta jabatan. Seorang Umar bin Khattab bahkan sepanjang masa pemerintahannya tidak bisa tidur lelap karena memikirkan nasib rakyatnya.

¹¹ Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan, *op.cit.*, h.118.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahkan menyatakan *“Jika ada ada seekor keledai sekalipun mati kelaparan di tepi sungai Eufrat (wilayah Irak sekarang), jelas itu tanggung jawabku yang akan aku pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti.”*

Dalam ungkapan seorang tokoh pejuang nasional kita, KH Agus Salim yang hidup jujur dan sederhana seumur hidupnya dan berpantang hidup mewah, *“leiden is lijden”* (memimpin itu menderita). Seorang Agus Salim yang mantan menteri luar negeri pertama Republik Indonesia dan fasih berbicara sembilan bahasa itu wafat dalam kondisi miskin di sebuah rumah kontrakan tua di gang sempit di bilangan Jakarta.

3. Idaroh (manajemen)

Terjemahan al-Qur'an: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. “ (QS Ash-Shaff, 61:4).

Terkait dengan poin 2 di atas, ada adagium manajemen menyatakan, *“Leadership is how to do the right thing, and management is how to do the thing right”* (kepemimpinan adalah bagaimana melakukan hal yang benar, dan manajemen adalah bagaimana melakukan hal dengan benar). Khalifah Ali bin Abi Thalib *Karomallahu wajhah* juga berkata, *“Kebatilan yang terorganisasi akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisasi”*.

4. Nizhom (peraturan)

Segala sesuatu ada aturannya. Bahkan burung bangau yang bermigrasi lintas benua pada setiap pergantian musim pun tertib mengikuti aturan terbang dalam pola huruf “V” bersama kawanannya. Tidak dapat semua dinisbikan atau ditiadakan atas nama demokrasi. Sesungguhnya batas kebebasan seseorang adalah hak orang lain.

5. Tahtid (program)¹²

إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (berpegang pada kebenaran). Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang yang mempersekutukan Allah.”

Selain unsur pemeliharaan, kepemimpinan, manajemen, aturan maka unsur pokok yang merupakan ujung tombak di lapangan adalah program. Kepedulian yang sedemikian tinggi serta kebijakan yang baik adalah nihil jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Salah satu elemennya adalah keteladanan. Dengan keteladanan, orang akan melihat integritas seseorang dan bukti antara perkataan dan perbuatannya. Demikian banyak pemimpin di negeri ini gagal karena berbeda antara kata dan perbuatannya. Negeri ini pun terperosok karena kurangnya integritas pemimpin dan kalangan politisinya. Seperti perkataan Syaikh Asy-Syahid Izzuddin Al Qossam, mujahid Palestina pada perang 1948:

¹² Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan, *op.cit.*,h.282.

“Dunia Islam tengah terbakar! Marilah kita memadamkannya, walau dengan sepercik air!”

F. Jabatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru¹³

Tabel III: 5

Tahap pertama penjabat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

NO	NAMA	JABATAN
1	H.YUSRI MUNAF, SH. M.Hum	KETUA
2	MAKMUR HENDRIK	ANGGOTA
3	Ir. A.Z. FACHRI YASIN, M. Agr	ANGGOTA
4	NENI ASTUTI, S.Pi. M.Si	ANGGOTA
5	ABDUL WAHID, S.Ag	ANGGOTA

Tabel III: 6

Tahap kedua penjabat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

NO	NAMA	JABATAN
1	T. RAFIZAL AR, S.os, M.Si	KETUA
2	MAKMUR HENDRIK	ANGGOTA
3	Ir. A.Z. FACHRI YASIN, M. Agr	ANGGOTA
4	NENI ASTUTI, S.Pi, M.Si	ANGGOTA
5	ABDUL WAHID, S.Ag	ANGGOTA

Sumber : Komisi Pemilihan umum kota Pekanbaru.

G. Partai Politik

Partai politik adalah berasal dari dua kata yaitu, ” *Partai*” dan ” *Politik*”.

Partai dalam kamus bahasa Inggris adalah ” *Party*” semakna juga dengan *sport event*. Sebenarnya partai berasal dari bahasa Latin, ” *darti verba partire*”, yang

¹³ Komisi Pemilihan Umum kota Pekanbaru

artinya membagi (*to divide*).¹⁴ Kemudian partai digunakan dengan makna yang longgar dan lebih tidak jelas. Pada dasarnya, istilah partai membawa gagasan tentang bagian (*part*). Istilah part masuk kedalam bahasa Prancis "*partager*", yang artinya membagi-bagi, dan masuk dalam bahasa Inggris "*partaking*" (mengadakan kemitraan dan partisipasi). Dalam kamus Arab yang sama makna dengan partai adalah "*hizb*". Partai dalam arti sederhana adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui konstitusi sebuah negara tertentu. Sedangkan Politik dalam bahasa Inggris adalah "*politics, political* atau *policy*". Kemudian dalam bahasa Arab adalah "*Siasah*" berarti menguruskan sesuatu urusan dan memperbaikinya. Dalam hadis ada disebutkan bahwa: " *Bani Israel telah disiasahkan oleh nabi-nabi.*" Maksudnya nabi-nabi menguruskan urusan-urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin terhadap rakyat. Politik sudah dimaklumi kaitannya sangat dekat dengan kekuasaan, kemudian kekuasaan itu bisa dipahami seperti menguasai sebuah negara. Oleh karena itu politik identik dengan penguasaan negara atau pemerintahan. Jadi politik menurut Istilah bisa disebut mengatur urusan negara.

Politik dalam teori barat seperti teori Marks berasaskan kepada pertempuran antara kasta-kasta dalam masyarakat dan revolusi golongan buruh (barolitaria) yang ditekan dan bertembung dengan golongan elit. Akhirnya mereka memperoleh kemenangan dan dapat mengambil kekuasaan daripada golongan elit. Kemudian dalam teori demokrasi yang meyakini prinsip-prinsip revolusi Prancis. Idea demokrasi ini mengandaikan bahwa penglibatan politik semua

¹⁴ Sigit Pamungkas," *Partai Politik Teori dan Peraktek di Indonesia*,(Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), Cet.Pertama,hal.9.

penduduk merupakan satu-satunya sumber kuasa legislatif. Dalam teori diktator pula bahwa politik terletak di tangan seorang individu tanpa apa-apa pengawasan ke atasnya.

Politik menurut pandangan Islam adalah menjaga urusan umat di dalam dan luar negara dengan cara yang tidak menyalahi syariat Islam. Siyasah Sar'iyah tidak hanya terhad kepada apa yang telah disebut, tetapi disyaratkan agar ia tidak menyalahi tek al-Qur'an, sunnah, ijmak dan kaedah syarak dan dasar-dasar umumnya.

Ibn al-Qayyim telah berkata : ” Sesiapa yang telah berkata bahwa politik ialah apa yang disebut oleh syarak saja, maka ia adalah satu kesilapan dan menyalahi para sahabat. Ibn Aqil telah berkata, ” Siasah ialah perbuatan yang dengannya manusia menjadi lebih hampir kepada kebaikan dan jauh daripada kerusakan, sekalipun ia tidak dinyatakan oleh Rasulullah dan tidak ada wahyu yang turun mengenainya.¹⁵

Depenisi partai politik sangat beragam oleh para ahli. Imawan (1996) menyebutkan tidak kurang dari 80 variasi tentang partai politik. Berbagai pendapat tentang partai politik terutama berbeda dalam penekanannya.¹⁶ Ada yang menekankan akar ideologi partai seperti Burke dan Reagan, penekanan partai sebagai alat untuk mendapatkan pemerintahan seperti Epstein, Schlesinger, dan Aldrich, ada yang menekankan sebagai desain instrumen mediasi yang penting

¹⁵ Muhammad, Khalid Ali, *Sistem Politik Islam menurut pandangan al-Qur'an, al-hadis dan pendapat ulama salaf*, alih bahasa oleh Zahazan Mohamed,(Kuala Lumpur: Telaga Biru SDNBHD, 2008), Cet.Pertama,h.30.

¹⁶ Sigit Pamungkas,*op.cit.*,h.4.

dalam mengorganisir dan menyederhanakan pilihan pemilih dalam mempengaruhi tindakan pemerintah seperti Downs, Key, dan Chambers, dan sebagainya.

Partai Politik menurut Carr (1965, ” political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of goverment” (Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintahan)¹⁷. Kemudian partai politik menurut Budiardjo (2002: 161) bahwa partai politik adalah suatu kelompok terkelola yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sementara pengertian partai politik menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Republik Indonesia dinyatakan bahwa ” Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.¹⁸

Dari penegertian partai politik yang telah dikemukakan, ada tiga prinsip dasar dari partai politik, yakni sebagai berikut:

1. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kepentingan mayoritas.
2. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus di kelola.
3. Partai sebagi alat, yaitu alat untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan pemilihan umum.

¹⁷ Hafied, Cangara, *op.cit.*,h.208

¹⁸ Amandemen Undang-Undang Pemda 2008 (*Undang-Undang RI No.12 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*),(Jakarta, Sinar Grafika: 2008), Cet pertama, revisi 22 1999, hal.60.

H. Strategi Pemenangan

1. Definisi dan Konsep Strategi

Strategi adalah salah satu perangkat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu "stratos" yang artinya tentara dan kata "agein" yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi yang dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi merupakan suatu rancangan yang terbaik yang dikonsepsi militer untuk memenangkan peperangan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai teori strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi. Beberapa definisi strategi yang dikemukakan oleh pakar¹⁹ :

- a. Karl von Clausewitz (1780-1831) merumuskan strategi sebagai suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang.
- b. Martin Anderson (1968) merumuskan strategi adalah seni yang melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.
- c. Menurut Rogers (1982) yang berlatar belakang komunikasi, menjelaskan strategi komunikasi adalah rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru.
- d. Middleton (1980) strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (

¹⁹ Hafied, Cangara, *op.cit.*, h.291

media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.

- e. Menurut Tifatul Sembiring Strategi adalah langkah-langkah dalam berikhtiar untuk mewujudkan visi masa depan.²⁰
- f. Menurut Wheelan dan Hunger (Strategic Management and Business Policy Massachuset, 1995) Strategi merupakan program perencanaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memaksimalkan keunggulan bersaing dan meminimasi kelemahan.
- g. Menurut Porter (1985) (Freddy Rangkuty, 1997) Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
- h. Menurut Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977) dalam (Freddy Rangkuty, 1997) Strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

2. Tipe-Tipe Strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu :

1. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara bertahap. Misalnya strategi perekrutan anggota, strategi penugasan, strategi pengenalan lokasi, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.

2. Strategi kemenangan

²⁰ Usamah Hisyam, *Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring*, (Jakarta: PT.Darmapena Citra Media,2012),cet.ke-2,hal. 351.

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada kemenangan. Misalnya apakah organisasi ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi massa, strategi bertahan, strategi peninjauan kembali suatu dan sebagainya.

3. Strategi kampanye)

Strategi kompetisi ini sering juga disebut strategi kompetisi secara fungsional, karena strategi berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi kampanye, strategi operasi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

I. Perekrutan Calon

Perekrutan calon kepala daerah berbeda dengan perekrutan anggota partai politik (rekrutmen politik) meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mencitacitakan kemenangan dalam kontes pemilu atau pilukada. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Schattscheider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik²¹.

Perekrutan calon tidak mesti dari kader internal partai, karena rasional partai memberikan kriteria calon antara lain, popularitas, elektabilitas dan finansial yang kokoh. Namun partai politik tetap melakukan perekrutan awal

²¹ Sigit Pamungkas, *op.cit.*, h.89.

dalam internal partainya, jika tidak ditemui maka mereka membuka ruang kepada eksternal partai.

J. Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dan kampanye merupakan fase awal pemilu yang sangat menentukan bagi para calon. Karena disinilah dengan sistem demokrasi yang ada, tim kampanye bisa mengambil perhatian masyarakat banyak. Meskipun kampanye memiliki aturan yang dilembagakan, namun perilaku kampanye selalu mengambil kesempatan dengan berbagai peluang-peluang yang ada. Kampanye menurut Steven Chaffe dalam rice 1981 adalah *Political campaigns are aimed at the mobilization of support for one's cause candidate*²². Menurut Kotler dan Roberto (1989), kampanye adalah ” *Campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior*²³. Kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap perilaku tertentu.

Adapun kampanye politik seperti Richard A. Joslyn dalam Swanson (1990) melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik.

²² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet.ke-3,h.223.

²³ Hafied Cangara,*op.cit.*,h.284.

Juga menurut Imawan (1999) kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukung²⁴. Kampanye merupakan alat pengarah, pengenalan dan penggerakana kecenderungan yang ada kearah tujuan yang diperkenankan secara sosial seperti pemungutan suara, pembelian barang-barang, pengumpulan dana peningkatan kesehatan dan keselamatan dan sebagainya.

K. Tim Sukses

Tim sukses merupakan komponen yang bergabung dalam pemenangan seorang calon, walaupun mereka berbeda-beda tugas tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan sang calon mereka sebagai pemenang pemilu. Ada beberapa bagian tim sukses seperti berikut²⁵:

1. Penasehat

Penasehat berfungsi memberi masukan dalam hal strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh partai atau calon dalam mencapai tujuan, seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak-pihak yang menentukan dalam pemberian suara. Pada penasehat yang ditunjukan pada umumnya memiliki kematangan dan pengalaman sebagai politisi, dan mengikuti perkembangan dengan melihat dimensi-dimensi strategik yang tidak dilihat orang lain.

²⁴ *Ibid, hal:39.*

²⁵ *Ibid, hal:39*

2. Tim ahli

Tim ah yang akan dbawakan oleh calon, memberi subtansi atau tema terhadap isi pidato yang akan dibawakan, dan mem-back up calon jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bidang keahlian. Tim ahli biasanya terdiri atas para ahli di bidang politik, ekonomi, danli ialah kelompok ahli yang diangkat menurut bidang-bidangnya. Biasanya tugas tim ahli adalah menyusun program yaitu menyusun program setelah mendapatkan masukan-masukan keuangan, komunikasi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, kebijakan dan kerjasama luar negeri.

3. Tim Riset dan Litbang

Tim riset dan litbang ialah kelompok para peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan partai, misalnya persepsi masyarakat terhadap citra partai, pendapat masyarakat terhadap kapabilitas calon yang diusung, peta politik pemilih, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk para kader dalam bidang-bidang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja partai.

4. Tim Pengumpul Dana

Bagi yang ingin maju dalam pencalonan jabatan publik, seperti anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, gubernur dan walikota/bupati tidak hanya memerlukan banyak waktu, energi dan pendukung, tetapi juga memerlukan dana yang tidak kecil untuk

mempromosikan diri, kebijakan, dan pikiran-pikirannya. Oleh itu seorang calon atau kandidat merlukan tim pengumpul dana (fund raising) yang mengetahui sumber-sumber dana yang mereka bisa memanfaatkan. Biasanya tim pengumpul dana memiliki hubungan yang baik dengan para pengusaha.

5. Tim kampanye

Tim kampanye ialah mereka yang merencanakan dan menggerakkan kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan partai. Untuk menggerakkan kampanye, seharusnya ditunjuk seorang menejer kampanye yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan dan strategi komunikasi, atau yang memiliki pengetahuan dibidang politik dan sekaligus juga memiliki pengalaman dan hubungan yang baik dengan media.

Menejer kampanye menentukan komposisi tim kampanye, dan juga memberikan topik atau isu-isu tertentu yang harus diangkat oleh calon dalam pidato-pidatonya, menentukan jadwal kapan calon tampil dimuka umum dan siapa tokoh-tokoh kunci yang harus mendampingiya. Demikian pula tempat-tempat yang akan dikunjungiya ditentukan oleh menejer kampanye dengan konsultasi tim riset dan litbang. Menjer kampanye tentu saja tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh suatu tim yang terdiri dari penulis naskah pidato (speech writer), penulis iklan (copy writer), juru foto,

cameraman, humas yang disertai tugas untuk mengurus wartawan, konferensi pers, juru kampanye(jurkam), protokol (master of ceremony), pewawancara/penyiar, presenter, artis, tim teknis yang meliputi ahli audiovisual, komputer/internet, media design dan media production, serta distributor media. Mereka adalah orang-orang yang memegang posisi kunci dan menjadi roda penggerak mesin kampanye.

6. Tim penggalang massa

Mereka adalah orang-orang yang direkrut untuk menggalang massa, baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun massa, baik untuk kepentingan pengumpulan suara maupun show force untuk menunjukkan kekuatan partai kepada masyarakat dan calon pemilih. Penggalangan massa biasanya dilakukan untuk kampanye publik dilapangan terbuka, pawai, atau konser musik. Penggalangan massa juga dilakukan untuk mengingatkan para pemilih untuk datang ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.

7. Hubungan antar daerah

Tim ini merupakan orang-orang yang dipercayakan untuk menangani hubungan antar pengurus pusat dengan pengurus daerah wilayah dan cabang yang ada di ibukota provinsi dan kabupaten. Hubungan ini penting dalam menggerakkan mesin organisasi pada tingkat bawah sehingga hubungan itu tetap terjaga dan berkesinambungan.

8. Pengamat (intelijen)

Kelompok ini dibentuk untuk mengamati dan mengawasi tindak tanduk lawan politik yang membahayakan citra partai atau calon. Tim intelijen ini biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang kemiliteran dan kepolisian dibidang intel dan penyelidikan. Tim pengamat mengumpulkan dan menyampaikan informasi (data) ke pimpinan partai untuk segera diambil tindakan dalam mengatasi hal tersebut. Ia juga menjadi mitra tim riset dan litbang untuk penyusunan strategi yang menguntungkan.

9. Tim pengamanan

Tim pengamanan sangat penting, terutama untuk memberi perlindungan keamanan kepada calon yang diusung oleh partai sebab dinegara-negara yang memiliki kondisi keamanan belum stabil, perlindungan kepada calon , apalagi untuk posisi presiden atau gubernur, sangat diperlukan. Tim pengaman biasanya direkrut dari tenaga-tenaga terlatih dalam menggunakan senjata api, misalnya mantan tentara atau polisi.

10. Tim pengumpul suara (vote getter)

Mereka terdiri dari orang-orang yang direkrut karena pengaruhnya yang besar dalam masyarakat. Mereka biasanya memiliki kedudukan sosial ekonomi yang terpendang, misalnya mantan menteri, gubernur, bupati, pemilik tanah pertanian yang memiliki pekerja yang banyak, pengusaha nelayan dan pelayaran yang punya anak kapal, imam desa

dan tokoh-tokoh adat yang disegani oleh masyarakat karena memiliki kharisma. Para tokoh-tokoh masyarakat ini digalang oleh partai politik untuk menjadi pengumpul suara(vote getter) karena pengaruhnya.

L. Koalisi Politik

Koalisi merupakan peraktek politik yang lumrah di negara-negara penganut multi partai. Karena kemenangan sebuah partai tidak dapat mengatur secara optimal kekuasaan akibat banyaknya partai yang menjadi oposisi. Koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah(Heywood).²⁶ Atau penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit (Gamson)²⁷.

Koalisi politik tidak dibedakan dengan koalisi partai dari segi tujuan. Namun bisa dibedakan dalam hal ruang lingkup. Koalisi politik tidak membatasi ukuran besar kecilnya sebuah organisasi. Seperti koalisi politik antara mahasiswa antar fakultas. Sementara koalisi partai sudah tertanam dipikiran kita, bahwa koalisi yang di lakukan adalah cara mendapatkan pengaruh yang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan berdasarkan konstitusi yang berlaku dan proses ini telah ditetapkan Undang-Undangnya oleh negara yang bersangkutan.

²⁶ Sigit Pamungkas, *op.cit.*, h.77.

²⁷ *Ibid*

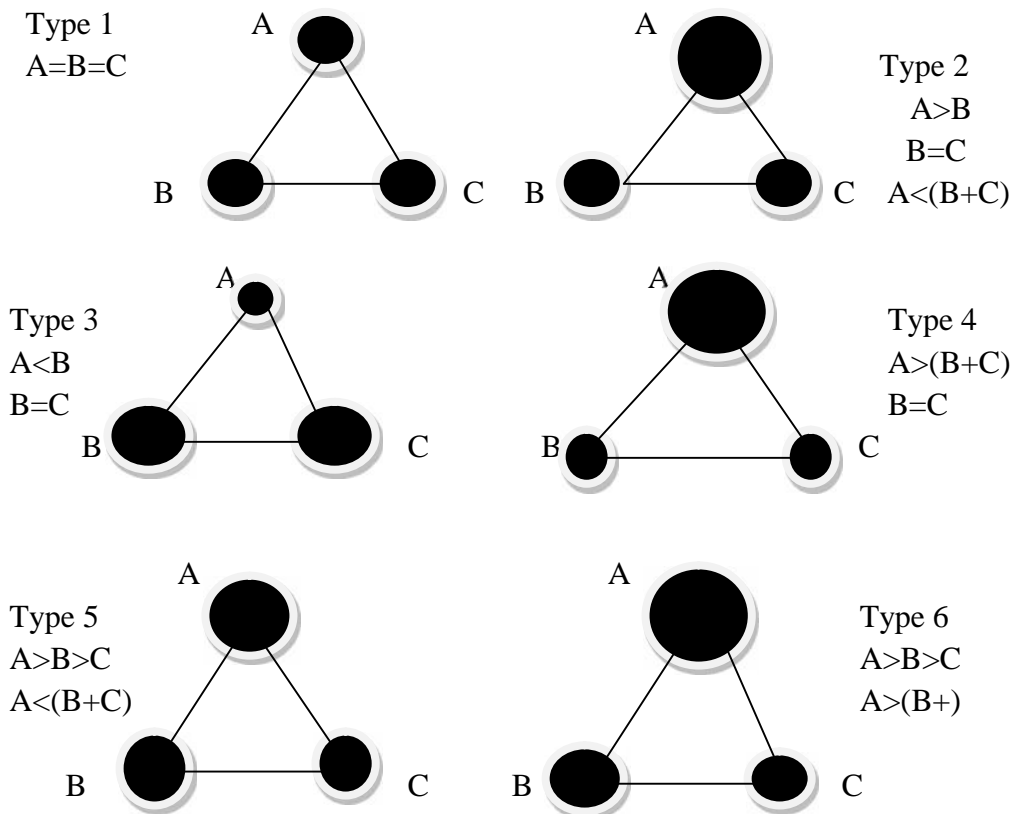
Pengikatan koalisi dilakukan para aktor dengan tawar menawar menciptakan berbagai kemungkinan kontrak politik tentang bagaimana bentuk koalisi maupun pemutusan kerjasama. Penyatuan motif dan ketrampilan berpolitik kemudian menjadi titik penting dalam koalisi, sebab ia dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik diantara partner koalisi agar semua pihak memperoleh hasil maksimal. *Theodore Caplow* dalam ” *A Theory of Coalition in The Triad*” (1956) membuat simulasi kemungkinan koalisi dari tiga kekuatan (*triad*) yang berbeda. Kemungkinan koalisi dari triad dibangun atas sejumlah asumsi berikut²⁸:

1. Anggota triad mungkin berbeda kekuatannya. Anggota yang lebih kuat dapat mengontrol anggota yang lebih lemah, dan akan berusaha melakukannya.
2. Setiap anggota triad mencari kontrol atas anggota yang lain. Kontrol atas dua yang lain lebih disukai daripada mengontrol satu lainnya. Kontrol atas satu yang lain dipilih daripada tidak ada yang di kontrol.
3. Kekuatan adalah bertambah. Kekuatan kolaisi adalah setara dengan jumlah kekuatan dari dua anggota.
4. Formasi koalisi berlangsung dalam situasi triadik, dengan demikian ada suatu kondisi pra-koalisi disetiap triad. Setiap upaya yang dilakukan oleh anggota yang lebih lemah kedalam penggabungan

²⁸ Sigit Pamungkas, *op.cit.*, h.79.

koalisi yang tidak menguntungkan akan memprovokasi pembentukan koalisi yang menguntungkan untuk menentukan paksaan.

Formasi Triad



Berdasarkan asumsi tersebut suatu triad akan melahirkan 6 (enam) tipe koalisi. Tipe 1 : Ketiga anggota kekuatannya sama ($A=B=C$). Simulasi atas formulasi ini misalnya masing-masing aktor memiliki kekuatan 1. Tipe ini merupakan tipe yang sangat jarang dalam dunia politik. Jumlah kekuatan politik dari aktor-aktor yang bermain setara, sehingga mereka sama-sama bermain secara terbuka untuk memasukkan aktor yang lain dalam sekutunya agar lebih kuat lagi.

Tipe 2 : Salah satu anggota koalisi lebih kuat daripada dua lainnya. Namun tidak terlalu jauh kekuatannya. Formulasinya: ($A>B$, $B=C$, $A<(B+C)$). Formula ini

dapat disimulasikan dengan $A=3$, $B=2$, $C=2$. Pertimbangan jika A berkoalisi dengan B mereka akan kuat, tapi B tidak merasa senang karena dibawah kontrol A yang lebih kuat. Maka kemungkinan B akan berkoalisi dengan C meski lebih kecil.

Tipe 3 : Dua anggota dalam triad adalah sama dalam kekuatan, tapi kali ini anggota ketiga adalah lemah ($A < B$, $B = C$). Contoh formulasinya adalah $A=1$, $B=2$, $C=2$. Pada situasi ini B dan C mungkin tidak suka berkoalisi karena tidak memperbaiki pre koalisi. Namun apabila A menerima tawaran dari B dan C maka aktor ini akan menerima karena berdampak langsung pada perubahan dominasi B atas C atau C atas B. Jadi ada kemungkinan berkoalisi AB dan AC.

Tipe 4 : Kekuatan salah satu anggota melebihi kekuatan gabungan dua anggota lainnya, dimana dua anggota lainnya memiliki kekuatan setara ($A > (B+C)$, $B = C$). Rumusan itu dapat diformulasikan dengan $A=3$, $B=1$ dan $C=1$. Pada situasi ini B dan C tidak memiliki motif untuk memasuki koalisi satu sama lain. Begitu juga A tidak berminat mengajak B atau C berkoalisi karena sudah kuat. Dalam hal ini kemungkinan tidak ada koalisi, kecuali B atau C mendapatkan cara untuk merayu aktor A.

Tipe 5 : Tidak ada anggota triad dengan kekuatan

M. Tim Profesional, Amanah dan Santun (PAS)

Tim Profesional, Amanah dan Santun (PAS) merupakan pengistilahan bagi kandidat pasangan Firdaus, ST.MT dengan Ayat Cahyadi, S.Si pada pemilukada kota Pekanbaru tahun 2011. Sebutan PAS merupakan simbol calon dengan memasarkan kepada masyarakat bahwa calon yang diusung memang

memiliki perilaku yang profesional, amanah dan santun. Segala anggota pemenangan yang menyatakan dirinya siap untuk memasarkan calon PAS agar melakukan simbol pemenangan dengan nama PAS. Para kader Partai yang tergabung dalam tim PAS juga melakukan hal yang sama. Seperti kader Partai Keadilan Sejahtera, terutama yang aktif sebagai anggota pemenangan.

BAB IV

PERAN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PEMENANGAN WALI KOTA H. FIRDAUS, ST. MT DAN WAKIL WALI KOTA AYAT CAHYAD, S.Si

A. Strategi Dalam Pemenangan Walikota Firdaus, ST.MT dan Wakil Walikota Ayat Cahyadi, S.Si

Pemilukada langsung merupakan salah satu sistem demokrasi yang diterima di Indonesia sejak beberapa waktu setelah reformasi. Diberlakukannya undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua pejabat public direcrut oleh rakyat dengan pemilihan langsung. Sebelumnya, melalui Undang-undang N0. 23 Tahun 2003, pemilihan langsung hanya untuk anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Undang-undang No.23 Tahun 2003 pemilihan langsung diberlakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Adapun pelaksanaan Pemilukada langsung oleh masyarakat pertama kali di laksanakan pada bulan Juni 2005 setelah Undang-undang Tahun 2004 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemilukada kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 merupakan amanah undang-undang yang berlaku seperti daerah yang lain di Provinsi Riau. Pada tahun 2011 Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilukada hampir 10%, salah satunya adalah Kota Pekanbaru. Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilukada tersebut adalah:

Tabel IV: 7

Kabupaten kota yang melaksanakan pemilukada 2011

NO	PROVINSI	AKHIR MASA JABAT AN	JADWALPEMUNGUT- AN SUARA
1	Kabupaten Pelelawan	27 Maret 2011	16 Februari 2011
2	Kabupaten rokan Hulu	19 April 2011	16 Februari 2011
3	Kuantan singingi	01 Juni 2011	07 April 2011
4	Kabupaten Rokan Hilir	07 Juni 2011	07 April 2011
5	Kabupaten Siak	19 Juni 2011	07 April 2011
6	Kota Pekanbaru	17 Juli 2011	18 Mei 2011
7	Kabupaten Kampar	11 Desember 2011	10 Oktober 2011

Adapun pemilukada Tahun 2011 itu, merupakan kali kedua pemilukada langsung di kota Pekanbaru. Pada Tahun 2006 pertama kali dilaksanakan pemilukada kota Pekanbaru. Herman Abdullah dan Erizal Muluk sebagai pemenang Walikota dan Wakil Walikota atas kandidat yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Ir.Irwandi Saleh bergandengan dengan Ayat Cahyadi, S.Si. Pada waktu itu perolehan suara kandidat Irwandi dengan Ayat Cahyadi 36%. Cukup kuat kalau dilihat dari Partai pengusung Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) yang relative masih muda. Sementara Partai pengusung kandidat pemenang waktu itu merupakan Partai Politik yang sudah lahir sejak Orde Baru¹.

Pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2011 pihak KPU juga mensyahkan hanya dua pasangan calon yang bertanding merebut kursi Pekanbaru². Diantara sekian kabupaten/kota yang melaksanakan pemilu pada di provinsi Riau pada Tahun 2011, hanya kota Pekanbaru yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Sehingga Partai pengusung kandidat masing-masing melakukan berbagai cara untuk memenangkan calonnya. Kader Partai Keadilan Sejahtera(PKS) beserta koalisi juga ikut berperan melaksanakan program pemenangan calon tersebut.

1. Program Tim PAS

Program Tim PAS merupakan gabungan program partai koalisi yang enam termasuk partai pendukung lain yang tidak memiliki kursi di DPRD kota Pekanbaru. Pada tim PAS melakukan strategi pemenangan melalui potensi partai masing-masing yang tergabung dalam koalisi. Namun dari segi keaktifan, partai PKS memiliki tugas yang berbeda dengan anggota koalisi yang lain. Ini bukan hanya karena calon wakil wali kota yang di usung merupakan kader partai keadilan Sejahtera itu sendiri atau sebab merupakan partai besar. Akan tetapi karena begitu besar kepercayaan anggota koalisi dengan kedisiplinan PKS melaksanakan tugas, serta kadernya yang amanah dalam melakukan tugas.

¹ Syamsudin B Ketua DPD PKS kota Pekanbaru (*Wawancara* , di kantor DPD PKS tanggal 24 Juli 2012)

² *Ibid*, *Wawancara*.

Ada strategi pemenang tim PAS dari kader Partai Keadilan Sejahtera, terbagi kepada 3 (dua) model, yaitu³:

a. Membangun Network

Network ini adalah jaringan yang dibentuk mulai dari pengurus inti sampai yang paling bawah. Pengurus inti disini diketuai oleh bapak Samsudin B yang merupakan ketua 1 dari tim kolasi⁴. Ketua inti berperan sebagai kordinator induk yang membawahi pemegang amanah ditingkat kecamatan. Sedangkan DPC disini sebagai jaringan kedua yang bertugas sebagai penerima laporan dari DPRa dan pengarah tugas pemenangan kepada DPRa. DPC biasanya menyusun agenda-agenda dan jadwal untuk acara sosialisasi calon secara langsung kepada masyarakat dikecamatanannya sendiri. Kemudian jaringan ditingkat ke-3 adalah DPRa sebagai penerima tugas yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Seperti di di Rumbai Pesirir dilakukan pengajian bersama pak Ayat Cahyadi.⁵ Jaringan ke-3 banyak memberikan pendekatan langsung kepada masyarakat antara lain, pengajian ibu-ibu, turnamen futsal untuk anaka muda tingkat kelurahan, dan lain-lain.

Pengurus inti di DPD PKS yang di ketuai oleh pak Samsudin B dan kordinator di kecamatan yang jumlahnya 12 orang. Kemudian kordinator ditingkat Kelurahan yang jumlahnya 1 orang di tiap-tiap keluarahan. Karena jumlah kelurahan diseluruh kota Pekanbaru 40 kelurahan , maka kordinatonya juga 40 orang. Apabila kita melihat peran masing-masing kordinator sungguh besar

³ Herial bagian menejemen pemenangan PKS pada pemilukada kota Pekanbaru 2011,(*Wawancara*, tanggal 26 Juli 2012 di kantor DPD PKS kota Pekanbaru).

⁴ *Ibid*

⁵ Andi Widodo ketua DPC PKS Rumbai Pesisir (*Wawancara* di DPD PKS kota Pekanbaru tanggal 26 September 2012).

karena saling melengkapi dan saling berbagi tugas. Kordinator dalam hal ini memiliki peranan sebagai penghubung antara masyarakat dengan calon yang di usung itu sendiri. Namun kordinator disini bukan yang paling aktif menerima dan menyampaikan Visi,Misi program koalisi karena kordinator masih membawahi anggota kader sebagai masyarakat itu sendiri serta simpatisan yang loyal kepada calon yang di usung.

Kordinator yang membidangi lewat network program kader PKS memiliki tanggungjawab pembuatan laporan kepada kordinator Inti sebagai bukti telah melaksanakan tugas. Laporan kordinator dilakukan dengan bertahap, yaitu tahap 1 sampai seterusnya. Anggota yang ditugaskan untuk mensosialisasikan program pasangan calon yang di usung dengan cara massal bukan dengan door to door. Seperti membuat acara pengobatan gratis, gotong royong dilingkungan RT/RW, memberi bantuan pendidikan anak yatim dan lain-lain. Saat inilah anggota network berperan dengan mengaitkan simbol-simbol visi-misi pasangan calon.

b. Direcselling

Direcselling adalah sosialisasi dalam rangka mengenalkan seseorang kepada masyarakat banyak dengan metode person to person alias door to door. Adapun system penyampaian yang dilakukan sudah diatur terlebih dahulu sesuai yang dipelajari dalam tranning saat sebelumnya selama 2 hari berturut-turut.

Anggota yang tergabung dalam dirrecselling ini terbagi dalam dua kelompok dan kategori keanggotaannya sebagai kader partai, yaitu:

A. Kelompok Reguler. Kelompok ini yang di seleksi dari kader-kader yang di bawah Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (

DPD PKS), mereka berjumlah lebih kurang 20 yang disebut tim Ranger. Seleksi ini dilakukan ketika melakukan training di Hotel Mona selama 2 hari. Saat inilah para peserta pelatihan di seleksi melalui wawancara dan menilai kedisiplinan.

- B. Kelompok part time. Kelompok ini juga diseleksi sebelumnya dan telah mendapat training ditempat yang sama. Namun mereka tidak memiliki waktu setiap hari sebagai dirreccelling.

Para anggota dirreccselling sebelum berangkat lapangan, mereka diwajibkan untuk berkumpul di kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD PKS). Mereka mengisi absen pagi serta mempersiapkan bekal-bekal selama dilapangan baik berupa konsumsi, stiker-stiker untuk di temple atau disebarkan. Para Tim juga membawa peralatan P3K sebagai pertolongan pertama kepada anggota yang memerlukan.

Kelompok Tim Ranger melakukan dirreccselling secara fulltime mulai hari Senin sampai Sabtu yaitu start Pagi-Sore (Jam 08.30 -16.00).

Para direccselling melakukan sosialisasi secara door to door atau para Tim PAS menyebutnya silaturrahi. Mereka dalam hal ini bertujuan memperkenalkan pasangan calon yang diusung serta menjelaskan raencana program-program kerja pembangunan apabila terpilih nanti. Kelompok ini melakukan sosialisasi kepada tempat yang telah dipetakan oleh kordinator inti dengan cara melakukan survey pada waktu sebelumnya.

Para Tim diberikan target setiap hari dengan cara menempatkan mereka disatu titik start kemudian diberikan arahan untuk mengakhiri di titik lain. Mereka anggota Reguler ini dibagi kepada beberapa kelompok kecil, yaitu anggota yang berjumlah 20 orang dibagi kepada 3 kelompok yang berjumlah 7 orang. Perempuan dibuat satu kelompok yang dibedakan dengan kelompok lelaki.

Adapun anggota direcelling Reguler dan part time melakukan laporan kerja setiap sekali dalam seminggu. Tim regular laporannya setiap hari Sabtu sedangkan part time hari minggu. Menurut bagian manajemen pemenangan PemiluKada dari PKS yaitu Herizal bahwa mereka para tim direcselling di tempatkan pada tempat yang berbeda-beda setiap hari.

c. Saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Sesuai jadwal pemiluKada kota Pekanbaru tahun 2011, maka tim koalisi Profesional, Amanah dan Santun (PAS) mengambil peran masing-masing. Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera juga tidak ketinggalan. Bahkan mereka sudah menyatakan serius mendukung dengan mengorbankan segalanya kepada kandidat yang mereka usung. Dalam hal ini, untuk menghadapi proses pemiluKada selanjutnya, maka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Pekanbaru membagi-bagi tugas sebagai berikut:

Menjelang hari pemiluKada dilaksanakan para tim manajemen pemenangan telah merekrut kader partai untuk dilatih agar dijadikan nantinya sebagai saksi di Tempat Pemungutan Suara(TPS). Sesuai dengan keterangan

ketua DPD PKS kota Pekanbaru, bahwa Partai Keadilan Sejahtera(PKS) telah menyiapkan kader-kadernya yang relative muda dan cerdas disetiap TPS sebagai saksi pada pemilukda. Bahkan Sesuai dengan ketentuan tim koalisi yang menjadi saksi di TPS minimalnya adalah dua orang. Yang mana satu orang di dalam area KPPS dan satu orang lagi di luar sebagai pemantau dari luar. Disini terlihat kader-kader PKS yang paling aktif kerjanya dalam hal penjagaan di TPS, sesuai keterangan wakil DPD PKS bapak Fauzan Lc “ para anggota koalisi telah memberikan amanah kepada PKS masalah pengaman di TPS pada saat pemungutan Suara Ulang (PSU)”⁶.

Para saksi PKS tidak hanya duduk diam di tempat pemungutan suara, mereka sangat disiplin dan kritis agar pelaksanaan pemilukada berjalan dengan jujur dan adil. Setelah saksi beserta KPPS melakukan penghitungan suara dan saksipun sudah mengetahui jumlah suara para kandidat dan telah menerima Form C1 dari KPPS maka mereka memberi laporan kepada Penanggungjawab dikelurahan tentang hasil suara. Kemudian para saksi meneruskan pengawasannya sampai hasil suara di tps sampai kepada PPS (kecamatan).

1. Kordinator saksi di kecamatan

Kemudian para kordinator kemenangan PKS di tingkat kecamatan menyambung tugas para saksi yang tadinya telah melaporkan Form C 1 kepada kordinator kecamatan. Kordinatorpun melakukan rekap hitungan cepat (cuickcound) sebagai antisipasi penipuan hasil suara TPS secara

⁶ Fauzan , op.cit., *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2012

keseluruhan. Dengan menyatukan form C dari kesemua TPS maka kordinator kecamatan telah mengetahui jumlah suara yang mereka peroleh dan jumlah suara kandidat lain.

2. Pengawalan Hasil Suara di Kecamatan

Kemudian setelah hasil suara di ketahui melalui Form C1 yang sampai kepada kordinator kecamatan. Maka kordinator kecamatan yang berada di 12 kecamatan mengantarkan hasil suara melalui Form C1 ke kantor DPD PKS kota Pekanbaru. Pada malam harinya 98% hasil suara sudah masuk ke DPD dan persentasi ini sudah cukup untuk diterbitkan ke media sebagai antisipasi kecurangan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akhirnya jumlah suara sudah diketahui melalui pengumuman Komisi Pemilihan Umum.

2. Struktur

Tim PAS memiliki program pemenangan calon yang diusung partai koalisi Partai. Program ini merupakan strategi partai koalisi untuk mencapai kemenangan. Setiap partai yang tergabung dalam Tim PAS diserukan kepada kader dan simpatisan partai untuk mendukung pasangan calon yang telah duluan di usung oleh utusan partai dikoalisi masing-masing. Jika para kader dan simpatisan telah mengatakan persetujuan atas arahan yang diberikan utusan partai di koalisi, maka ini menandakan para kader yang solid di internal partai, begitu juga sebaliknya apabila para kader tidak menyatakan persetujuan atas arahan partai maka ini menandakan para kader belum solid. Tetapi hal ini tidak sampai menyebabkan

kader yang tidak setuju untuk di keluarkan atau di pecat, karena perkara yang diusung hanya sebagai alternative saja.

Koalisi dalam kemenangan tim PAS partai memiliki komposisi berbeda jika dilihat dari kursi DPRD kota Pekanbaru periode 2009-2014.

Tabel IV : 8

Komposisi partai politik yang tergabung dalam tim PAS sesuai dengan kursi DPRD kota Pekanbaru periode 2009-2014

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrat (PD)	9
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
3	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	1
4	Partai Bulan Bintang (PBB)	2
5	Partai Hanura	2
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3

Tim PAS adalah tim kemenangan yang beranggotakan kader-kader partai koalisi PAS. Mereka memiliki struktur pengurusan tim sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV: 9

Pengurus Tim Koalisi PAS

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD KHOIDIR	KETUA
2	MUHAMMAD FADRI, S.Com	SEKRETARIS
3	SYAMSUDIN B (Partai Keadilan Sejahtera)	WAKIL 1
4	TITIN (Partai Demokrat)	WAKIL 2
5	SULAIMAN (Partai Hati Nurani Rakyat)	WAKIL 3
6	AZWIR (Partai Bulan Bintang)	WAKIL 4
7	MAWARDI (Partai Demokrasi Kebangsaan)	WAKIL 5
8	KORDIAS PASARIBU (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	WAKIL 6

Pengurus inilah yang membidangi kordinator pemenangan bagi partainya masing-masing.

Posisi sekretaris pemenangan calon dilihat sangat strategis dan cukup besar dari segi peran. Muhammad Fadri dalam hal ini membidangi sekretaris pemenangan tim PAS menerima tugas masalah yang berkaitan dengan administrasi pemenangan. Begitu juga dengan kordinator pemenangan untuk Partai Keadilan Sejahtera yaitu Samsudin B. Sejalan dengan posisi Samsudin

sebagai ketua DPD PKS kota Pekanbaru. Hal ini memberikan pengaruh besar bagi kader-kader partai dan juga simpatisannya.

Tim profesional, amanah dan santun dibagi-bagi menjadi beberapa tim khusus. Antaranya tim pemenangan khusus kader-kader partai masing-masing anggota koalisi. Seperti misalnya partai Demokrat membentuk sebuah tim yang beranggotakan kader-kader partainya atau beserta simpatisan partai. Begitu juga dengan partai PDK, PDIP, PBB, Hanura dan PKS. Mereka ini melakukan pendekatan dengan alat menyatakan bahwa kandidat yang mereka usung adalah dukungan partainya.. Namun dari segi penamaan tim ini tidak ada nama tersendiri karena mereka melakukan pendekatan kepada simpatisan partai mereka sendiri. Kader partai koalisi ini merupakan tonggak penyebaran maklumat calon sehingga dianggap sangat efektif dalam pemenangan calon. Bisa dilihat peran kader-kader partai koalisi seperti Demokrat yang memiliki jumlah suara ketika pemilihan legislatif DPRD kota dan Provinsi. Begitu juga dengan PKS yang memiliki 5 kursi di DPRD kota Pekanbaru saat pemilihan tahun 2009.

Tim berikutnya adalah tim pemenangan H.Firdaus, ST,MT Tim ini membentuk sebuah tim khusus yang sifatnya memasarkan pendekatan lewat jaringan yang bersumber dari pribadi beliau. Misalnya keluarga Firdaus yang berdomisili di kota Pekanbaru, teman sekerja yang pernah dengan Firdaus, bahkan masyarakat yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Firdaus. Dalam tim ini tidak terlalu ditekankan membawa simbol PAS, karena pendekatannya yang khusus.

Kemudian tim pemenangan Ayat Cahyadi,S.Si. Tim ini berasal dari kader-kader Partai Keadilan Sejahtera yang telah mendapat mandat dari pengurus partai PKS. Para kader di taklimatkan agar memberikan kontribusinya untuk pemenangan calon walikota dan wakil walikota yang akan berlangsung. Sehingga mereka memberikan perannya disetiap fase pemilukada.

Peran kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilukada dibagi menjadi empat tahapan, yaitu :

B. Peran kader Partai PKS

1. Tahap Pertama

Masa awal dalam hal ini adalah mulai penjaringan bakal calon yang di usung sampai penetapan calon sebagai kandidat calon walikota. Dalam tradisi internal PKS untuk menetapkan seorang calon terlihat berbeda dengan partai yang lain. Proses penjaringan bakal calon dilakukan oleh kader partai, saat itu targetnya adalah 2 nama yaitu⁷:

- a. Pak Ayat Cahyadi, S.Si
- b. Dian Suheri (Wakil DPRD kota Pekanbaru)

Melalui PUI(Pemilihan umum Internal) Partai PKS maka terpilihlah pak Ayat Cahyadi S.Si sebagai usungan partai. Setelah terpilih Ayat Cahyadi disosialisasikan kepada masyarakat pekanbaru untuk menilai respon masyarakat.

⁷ *Ibid*

Dengan terpilihnya Ayat Cahyadi oleh internal kader PKS sesuai dengan target awal yaitu hanya sebagai calon wakil walikota karena melihat kursi di DPRD kota yang belum meyakinkan. Oleh karena itu, PKS melakukan penjaringan pasangan Ayat dengan membentuk Tim Optimalisasi Musyarokah DPD yang melibatkan kader PKS dan masyarakat umum. Pada awalnya muncul 3 nama yang menjadi harapan yaitu⁸:

- a. H. Firdaus, ST, MT
- b. Erizal Muluk
- c. Septina (Istri Gubernur sekarang).

Penjaringan PKS dengan melihat 3 pertimbangan⁹, yaitu:

1. Dukungan partai politiknya; sejauhmana partai politik memberikan dukungan terhadapnya. Adakah partai pendukung bisa memberikan harapan besar kepadanya sebagai pemenang pemilu. Sehingga menambah kekuatan politik bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam mengusung calon.
2. Sosialnya di masyarakat; berkaitan dengan popularitasnya di masyarakat karena sudah dikenal banyak orang. Sehingga tidak terlalu sulit memasarkannya di masyarakat karena sudah dikenal banyak orang.

⁸ *Ibid*

⁹ Fauzan , Sekretaris DPD PKS kota Pekanbaru, (Wawancara tanggal 02 Agustus 2012, di kantor DPD PKS Pekanbaru).

3. Finansial; Untuk mendukung semua program maka financial sangatlah penting.

Ketika itu PKS melakukan penawaran terhadap 3 nama tersebut karena pak Firdaus lebih bersedia untuk digandengkan dengan Ayat Cahyadi, maka tim Optimalisasi Musyarokahpun menetapkan pak Firdaus dan Ayat Cahyadi sebagai calon walikota dan wakil walikota yang akan di usung. Karena dukungan partai kepada Firdaus-Ayat baru 5 kursi di DPRD kota sementara calon yang diusung minimal harus mendapatkan dukungan 9 kursi DPRD kota Pekanbaru. Maka dibentuklah koalisi bersama partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 2 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrasi Keadilan(PDK) masing-masing 1 kursi.

Setelah mendapat dukungan 9 kursi maka Tim koalisi mendaftarkan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beberapa hari kemudian bergabung Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) sehingga tim koalisi sempat mengklarifikasi data beberapa kali ke KPU karena bertambahnya tim koalisi. Meskipun DPP PDI Perjuangan sempat memecat pak Kordias sebagai anggota koalisi, namun KPU sudah menetapkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pendukung Firdaus-Ayat Cahyadi.¹⁰

2. Tahap Kedua

Setelah usungan partai koalisi sudah ditetapkan maka dibentuklah Tim pemenangan yang melibatkan semua partai koalisi. Pengurus yang menjabat

¹⁰ *Ibid*

sebagai sekretaris tim koalisi adalah Muhammad Fadri salah satu kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Tugas sekretaris dalam tim pemenangan sangatlah besar karena administrasi sejak awal semua di amanahkan kepada sekretaris. Bukan hanya mengurus berkas data yang masuk dari sebuah partai asalnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetapi mencakup semua data parta koalisi. Bagaimana mencatat anggaran untuk digunakan dalam rangka pendukung kemenangan calon itu juga melibatkan sekretaris. Dalam hal ini, kader PKS Muhammad Fadri sangatlah berperan dalam agenda pemenangan calon yang diusung partai koalisi (PAS).

Semua partai yang bergabung dalam koalisi PAS diberikan tugas kepada masing-masing partai. Tujuan ini adalah pembagian tugas pemenangan agar masing-masing partai memiliki peran. Melihat partai politik yang bergabung dalam tim PAS memiliki kekhasan yang berbeda-beda sehingga mereka bisa mendekati masyarakat yang majemuk pula. Karena penelitian ini fokus pada salah satu anggota koalisi tim PAS yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Maka saya hanya menjelaskan program-program Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai strategi pemenangan calon.

3. Tahap Ketiga

Tahap ini adalah tahap mempertahankan kemenangan bagi tim PAS. pasca diketahuinya menang berdasarkan penghitungan dan pengumuman KPU bukan berarti usai pilukada. Karena kandidat lain belum menerima putusan pilukada yang telah dilaksanakan. Dan mereka memutuskan mengajukan

banding ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menghadapi persoalan hukum maka di utuslah beberapa advokat sebagai pembela kemenangan kandidat tim PAS.

Tahap ini tahap ketiga peran kader PKS yaitu setelah ditetapkan pemenang pemilukada yang dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011. Kemudian Komisi Pemilihan Umum(KPU) memberikan waktu seminggu kepada pihak yang hendak mengajukan sanggahan terhadap proses pemilukada. Dalam hal ini Tim BERSERI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Disini tim koalisi mengutus advokatnya sebagai bantahan pihak penuntut yaitu tim BERSERI. Advokat tim koalisi antara Lain Aromilius, SH., Saud Maruli Manik, SH,MH dan Yulius,SH.MH. Tugas mereka dalam hal ini adalah memberikan keterangan serta bantahan terhadap tuduhan kecurangan yang dituduhkan oleh BERSERI. Sementara tim yang lain terus memberikan peran pembelaan kepada kandidat Firdaus. Kader PKS Mereka mengawal keputusan MK melalui pemberitaan di media- elektronik dan media cetak dan mengajak masyarakat berdo'a bersama agar keputusan MK berpihak kepada PAS. Namun akhirnya gugatan tim BERSERI diterima oleh MK dan dinyatakan akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Setelah selang 3 bulan komisi Pemilihan lum mengeluarkan jadwal PSU. Sudah 6 bulan berlalu pernyataan PSU yang ditunggu-tunggu juga belum muncul. Pada saat ini juga pihak koalisi terus mendesak putusan KPU tahap kedua agar secepatnya mengeluarkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU). Para kader PKS kembali mengajak massa turun kejalan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU)

secepatnya dilaksanakan. Kemudian para kader partai diarahkan untuk mengawal media supaya pemberitaan tetap berimbang dan adil. Maka akhirnya ditetapkanlah hari Rabu tanggal 30 Desember 2011 sebagai hari Pemungutan Suara Ulang(PSU).

Ketika Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan maka tim koalisi terus meningkatkan pengawalan prosesnya. Para kader PKS diamanahkan untuk menyurvei Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehari sebelum PSU. Tujuannya supaya pada hari PSU di ketahui tempat-tempat yang rawan berbuat kecurangan. Kemudian pada hari PSU ternyata tim koalisi yang lain sudah meyakinkan bahwa pengawasan di TPS harus di ikuti oleh kader-kader PKS karena dianggap jeli dan disiplin dalam bekerja.

Setelah PSU dilaksanakan serta keputusan KPU sudah ditetapkan sebagai pemenang. Maka tibalah saatnya peran terakhir tim koalisi dan para kader PKS yaitu mengikuti penetapan paripurna oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru yang dilaksanakan di gedung DPRD kota Pekanbaru.

C. Tinjauan Fikih siyasah Tentang Strategi pemenangan H.Firdaus, ST.Mt dan Ayat Cahyadi, S.Si oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilukada Kota pekanbaru

Pemimpin dalam sejarah keIslaman disebut khalifah atau imamah¹¹. Skala khalifah atau imamah sebagai pemimpin tertinggi disebuah negara Islam. Namun pemimpin tidak diartikan dalam arti sempit saja, yaitu pemimpin yang mengurus

¹¹ Said Hawa, *Al-Islam*, alih bahasa oleh Abd Hayyie al-khatani.dkk,(Jakarta: Gema Insani,2004),Cet.1,h.477.

bagian yang spesial juga disebut pemimpin. Karena hadis Rasulullah SAW menjelaskan:

Kepemimpinan dalam ajaran Islam sangat diperhatikan sebagaimana perhatian terhadap persoalan yang lain. Bahkan agama-agama selain Islam juga tidak menapikan persoalan kepemimpinan. Dalam Islam pentingnya kepemimpinan telah disebutkan Allah dalam kitab sucinya suroh al-Baqoroh ayat 30¹²:

رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat Sesungguhnya aku akan menjadikan kholifah (pemimpin) di muka bumi."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di muka bumi karena Allah sangat tahu dengan urgensinya. Pemimpin yang hendak Allah utus pun disesuaikan dengan jenis makhluknya sehingga tidak ada kesulitan bagi pengikutnya untuk berkomunikasi atau mencari solusi permasalahan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah khalifah(Pemimpin itu tidak sekedar kemauan tetapi memiliki kriteria maupun keahlian di bidangnya. Karena Allah menyebutkan dalam QS. An-Nisa(4):58 yang berbunyi¹³:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹² Depag, *op.cit.*, h.7.

¹³ Depag, *loc.cit.*

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengan dan Maha Melihat."

Sepanjang sejarah Islam pergantian pemimpin dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Adapun rujukan metode pergantian pemimpin para ahli politik Islam menjadikan masa kekhalifahan sebagai rujukan penting. Karena pada masa ini adalah masa awal umat diberikan kesempatan memilih pemimpinnya. Sedangkan masa sebelumnya yaitu masa kerasulan pemimpin umat yang langsung dipilih oleh Allah.

Pada masa Abu Bakar kepemimpinan Rasulullah SAW digantikan oleh beliau dengan cara pemilihan lewat musawarah di Saqifah. Dengan pengangkatan Abu Bakar itu, Abu Bakar hanya diusulkan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan (ahl syaukat) dan kemudian membaiaatnya. Kemudian diikuti sumpah setia (mubaya'at) umat kepadanya. Pola semacam inipun dilaksanakan terhadap Umar ibn Khattab ketika ia diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar.¹⁴

Proses pengangkatan Umar awalnya atas inisiatif Abu Bakar, karena Abu Bakar menilai Umarlah yang di pandang pantas untuk menggantikannya. Setelah Abu Bakar mengumumkan kepada rakyatnya bahwa Umar diangkat meneruskan kepemimpinannya, rakyat memberi mubaya'ah kepada Umar. Dari proses

¹⁴ Sudirman Jhohan, *Politik Keagamaan dalam Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 1995), Cet. 1, h. 64.

pengangkatan Umar, terlihat peranan Abu Bakar menentukan sekali. Jika sekiranya Abu Bakar tidak menunjuk Umar sebagai penggantinya, kemungkinan saja sahabat yang lain muncul sebagai calon khalifah. Akan tetapi dengan adanya penunjukan Abu Bakar itu sahabat lain tidak mencalonkan dirinya sebagai khalifah.¹⁵

Untuk mendapatkan otoritas politik sebagai pemimpin umat, Abu Bakar menganjurkan kepada rakyatnya untuk membaiat Umar. Dengan pembaiatan itu Umar menjadi pemimpin yang legal. Pengangkatan Umar ada bedanya dengan pengangkatan Abu Bakar, terutama bila kita lihat dari strategi pengangkatan mereka menjadi khalifah. Abu Bakar diangkat melalui proses pencalonan yang diusulkan oleh ahl syaukat dan direstui oleh ahl syaukat lain. Umar diangkat oleh Abu Bakar kemudian rakyat lain membaiat juga.

Menurut Abu Hasim pengangkatan seorang pemimpin atas usulan seorang saja dalam forum musyawarah kemudian disetujui empat orang dari anggota lainnya, maka calon tersebut bisa di bai'at. Sebagaimana pengangkatan Abu Bakar, yakni diusulkan oleh salah seorang anggota ahl syaukah dan direstui semua anggota yang berjumlah lima orang tersebut.

Abd al-Jabbar selain menerima pendapat Abu Hasim di atas, ia juga memberi alternatif dalam bentuk pola yang kedua, yakni memberi legitimasi kepada semua orang yang memenuhi persyaratan sebagai imam untuk mengadakan musyawarah siapa diantara mereka yang diusulkan menjadi imam

¹⁵ *Ibid*

atau khalifah. Jika mereka tidak menokohkan salah seorang diantaranya karena semuanya mempunyai kualitas kepribadian yang sama maka jalan yang harus ditempuh menurut Abd al-Jabbar adalah melaksanakan pemilihan dan mereka yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan itulah yang menjadi imam.

Aplikasi strategi kedua hampir sama dengan pengangkatan Usman bin Affan. Hal itu dapat dilihat sewaktu Umar bin Khattab akan mengakhiri jabatannya sebagai khalifah, beliau menunjuk enam orang sahabat senior untuk bermusyawarah memilih khalifah sebagai penggantinya. Diantara keenam itu adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqas, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalhat bin Ubaidillah.

Keenam orang diatas mempunyai kwalitas yang sama pada pandangan Umar bin Khattab, karena itulah ia menganjurkan supaya keenam orang itu bermusyawarah untuk mengangkat salah seorang diantaranya untuk meneruskan kepemimpinannya. Saat itu Abd Rahman bin Auf memimpin musyawarah yang di hadiri 5 orang karena tidak hadirnya Thalhah bin 'Ubaidillah. Akhirnya anggota yang berjumlah 5 orang itulah yang mengambil keputusan politik dalam mengangkat khalifah.

Dalam sidang itu Abd Rahman yang sejak semula cenderung mendukung Usman, mengadakan suatu taktik pengunduran diri sebagai calon. Iapun meminta calon yang lain untuk mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada yang mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kepemimpinan Umar bin Khattab. Akan tetapi ajakan itu tidak mendapat sambutan anggota yang lain. Akhirnya Abd

al-Rahman menawarkan sejumlah syarat serta menuntut calon khalifah untuk mengikuti nash al-Qur'an, sunnah, dan kebijakan kedua khalifah terdahulu. Syarat yang ditetapkan oleh Abd al-Rahman ditolak Ali, karena tidak mau tunduk terhadap kebijaksanaan politik parapendahulunya. Sementara itu Abd al-Rahman menawarkan pula syarat itu kepada Usman bin Affan. Usman menerima semua syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh Abd al-Rahman, sehingga Abd al-Rahman membai'atnya dan kemudian diikuti oleh anggota musyawarah lain. Setelah itu barulah rakyat yang memberi bai'atnya kepada khalifah Usman bin Affan.

Masalah-masalah kepemimpinan disebutkan dalam perundang-undangan negara yang bersumberkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana undang-undang mengandung syarat-syarat kepemimpinan yang agung. Syarat ini yang telah dirumuskan oleh ulama fiqih ada yang berbentuk syarat sah dan ada yang menjadi syarat sempurnanya. Syarat itu adalah: Islam, adil, lelaki, sehat fisik, merdeka, baligh, berakal sehat, memiliki ilmu yang memungkinkannya untuk ijtihad dan memiliki kemampuan strategi perang dan proses damai.¹⁶

Berkaitan dengan strategi kemenangan pemimpin (Walikota/Wakil Walikota) oleh kader PKS pada pemilu kota Pekanbaru Tahun 2011. Para kader PKS mengamanahkan kepada kader inti atau kader yang dianggap berilmu. Sehingga merekalah yang menjaring calon-calon untuk di jadikan calon pada

¹⁶ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Fiqh an-Nashir wa At-Tamkin*, alih bahasa oleh Samson Rahman, (Jakarta: Al-Kausyar, 2001) Cet. 1, h. 594.

pemilukada. Para calon inilah yang akan diperkenalkan kepada kader-kader partai PKS kota Pekanbaru. Setelah selesai seleksi dengan menetapkan satu orang terpilih sebagai calon usungan partai. Maka para kader langsung mengikuti keputusan tersebut.

Karena berada didalam negara demokrasi yang identik dengan partai, maka calon yang diusung menjadikan partai PKS sebagai sarana kemenangan dengan mengikuti pesta demokrasi. Kemudian para kader ikut memenangkan calon sehingga proses pemilukada selesai. Para kader tidak disuruh melakukan pelanggaran ajaran agama maupun etika moral yang dapat memburukkan citra partai dan Islam.

Jadi berkaitan dengan pemilukada kota Pekanbaru yang dilaksanakan Tahun 2011 baik pemilukada maupun pemungutan suara ulang merupakan wilayah fiqih prioritas. Yang mana peran kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat bahwa program yang dilakukan bersama tim koalisi dalam cita-cita yang sama demi masyarakat kota Pekanbaru merupakan kemestian. Sehingga semua elemen masyarakat dapat menikmati hasil kota Pekanbaru tanpa membedakan Agama, Ras, Budaya dan sebagainya. Karena mereka berada dalam kebutuhan sosial kemasyarakatan.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Pemilukada kota Pekanbaru yang dilaksanakan Tahun 2011 merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia. Kali ini partai politik masih tetap sebagai kunci dalam mencari pemimpin daerah kota Pekanbaru. Jangankan calon independen bahkan calon dari partaipun jika tidak mengadakan koalisi, maka kader terbaiknyapun akan susah menjadi pemenang.

Pemilukada kali ini jika di bandingkan dengan Tahun 2006 kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan sedikit nama baik. Karena merupakan salah satu anggota koalisi tim PAS yaitu pemenang pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2011-2016.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah kota Pekanbaru sebagai anggota koalisi membuat strategi kemenangan disamping strategi kemenangan tim koalisi. Meskipun mereka berkoalisi dengan partai yang berbeda ideology kerjasama yang mereka bangun tetap mengedepankan kepentingan masyarakat majmuk yang ada di kota Pekanbaru.

Dalam menghadapi pemilukada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak membawa eksklusif masa dan kepentingan. Karena pemahaman fiqih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dilihat sangat sederhana dan moderat.

Seperti dalam berkoalisi dengan partai yang berbeda ideologo mereka tidak menawarkan koalisi ideologi tetapi menawarkan koalisi kepentingan

masyarakat majmuk. Inilah yang dipahami Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah kota Pekanbaru saat pemilu kota Pekanbaru Tahun 2011 yang lalu.

Program tim koalisi PAS sebenarnya tidak seratus persen atas persetujuan Partai Keadilaan Sejahtera(PKS). Dan pada saat itu mereka tidak menolak karena mereka mengamalkan koedah daripada mudoratnya lebih besar lebih baik mencari yang lebih sedikit. Biarlah Saat-saat kemenangan karakteristik partai dengan cirri keIslaman mereka tidak terlihat, asalkan tim koalisi PAS tetap sama-sama berjuang mendukung calon pemimpin yang mereka yakini lebih baik daripada calon yang lainnya.

Partai Keadilan Sejahtera(PKS) melaksanakan program koalisi serta program partai sendiri yang mana para kader memiliki tanggungjawab masing-masing. Peran kader Partai PKS terlihat besar pada proses pemilu kota, mulai perekrutan calon dari internal partai. Dalam hal ini kader yang diusung merupakan ahli politik partai pada masanya sehingga kuat harapan atas kemenangan. Kemudian pada masa sosialisasi, kampanye, pada saat pemilu kota sampai kepada pasca pemilu kota para kader PKS terus bekerja memenangkan calon yang mereka usung dan anggota koalisi Profesional, Amanah dan Santun(PAS).

B.SARAN

Setelah saya memberikan kesimpulan pada penelitian ini, maka saya juga berkeinginan mengajukan pesan maupun saran yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun saran yang ingin saya sampaikan sebagai berikut:

- a. Karena pemilu adalah merupakan pesta demokrasi, maka semua yang terlibat agar selalu menyumbangkan kontribusi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- b. Partai politik merupakan salah satu yang berperan dalam pemilu, oleh karena itu partai politik mestilah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partainya.
- c. Koalisi politik mestilah dijalankan dengan kerjasama dan sama-sama bekerja dan menanamkan keikhlasan demi kepentingan masyarakat banyak.
- d. Partai Islam semestilah menanamkan nilai agama Islam sebelum nilai Pancasila sebagai ciri khas dan demi menjaga kebaikan agama Islam itu sendiri.
- e. Partai Islam dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disamping berkoalisi dengan partai nasionalis mestilah mempertahankan kekhasannya sebagai partai yang berideologi Islam dan Pancasila.
- f. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Tim Profesional, Amanah dan Santun (PAS) dan anggota koalisi yang lain setelah mendapat kemenangan, agar tetap menjaga kesatuan masyarakat Pekanbaru baik yang mendukung maupun yang tidak pada Pemilu yang telah dilaksanakan.
- g. Kader Partai merupakan kekuatan massa bagi masyarakat untuk itu pihak partai agar membentuk karakter kader yang loyal kepada visi, misi partai.

- h. Kader partai politik merupakan mesin partai yang bisa diasah dan dibisa digunakan secara maksimal, untuk itu janganlah hanya sekedar memperlalat mereka demi mencapai kepentingan sekelompok.
- i. Tim yang solid akan terbentuk apabila kesamaan cita-cita dijadikan pegangan yang mendasar. Janganlah membentuk koalisi yang tidak didasari kebenaran.
- j. Tim yang kuat adalah pekerja keras dan berilmu. Sertakan timmu beserta orang-orang yang berilmu karena Pemilu adalah perkara besar dan besar pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq, Farid, *Judul Fikih Politik Islam*.(Jakarta, PT.Sinar Grafika offset , 2005).

Abdul Hadi Awang, *Islam & Demokrasi*,(Selangor, PTS Islamika, 2007).

Andre Ardiansyah, *Kamus Mini Lengkap*,(tt, Surabaya: Pustaka Agung Harapan).

DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Profil Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung, PT Syamil Cipta Media, 2009).

Fuad Muhammad, Facrhuiddin, *Pemikiran Politik, Islam*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1986)

Hafied Cangara,Prof,Dr, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta,Rajawali Pers,2009)

H.A.Djazuli, Prof,MA, *Fiqih Siyasah(Implementasi masalah ummat dalam rambu-rambu syariat)*, (Bandung,Kencana, 2003), Cet.I

J. Suyuthi Pulungan,DR,MA, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*,(Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002),Cet.5.

Jhonni Ardan Mardan, *Politik Itu Islam, Islam Itu Politik*, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004.

Kholid Bin Ali Bin Muhammad Al-Anbariy, *Sistem Politik Islam (Terjemahan)*,(Kuala Lumpur, Telaga Biru, 2008).

Komisi Pemilihan Umum, *Buku panduan KPPS kota Pekanbaru*,(Pekanbaru, 2006).

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*,(Jakarta, Prenada Media Group, 2010)

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Siroh Nabawiyah; Kajian mendalam manhaj gerakan islam pada masa Rasulullah swt*, (Selangor, PT Pustaka Dini,2006).

Muhammad Darwis, *Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Di Kabupaten/Kota Di Riau Tahun 2010/2011 Perspektif Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Suska Press, 2011.

Mohd Izhar Ariff, *kepentingan al-Siyasah al-Syar'iyah dalam Negara Islam*, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.

Nanang Tahqiq, *Politik Islam*,(Jakarta, Prenada Media,2004).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), *Deklarasi Partai Keadilan & Peresmian Dewan Pimpinan Wilayah Riau*(Pekanbaru , 1998).

Rosnita Binti Za'far, *Sejarah Perkembangan Siyasah Sar'iyah*, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.

Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*,(Yogyakarta, Institute Democracy and Welfarism,2011),Cet.I.

Usamah Hisyam, *Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring*, (Jakarta, PT Dharma Pena, 2012) , Cet.2.

Yusuf al-Qaradhawy, DR, *Agama dan Politik Wawasan Ideal dan menyanggah Kekeliruan pemikiran Sekular-Liberal(Terjemahan dari Ad-din wa As-siyasah: Ta'shillun wa Raddu Syubuhah)*,(Kuala Lumpur, Alam Raya Enterprise, 2007), Cet.I.

Yusriadi , *Buku panduan saksi dalam pemilihan umum Kepala Daerah*, (Pekanbaru, 2011).